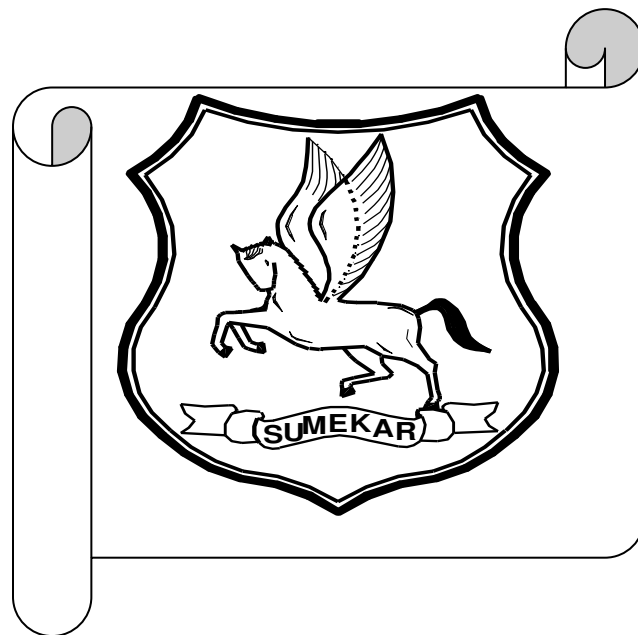


RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2024



**DINAS PENANAMAN MODAL,
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SUMENEP**

KATA PENGANTAR

Setiap proses penyusunan dokumen rencana pembangunan diperlukan koordinasi antar instansi Pemerintah dan partisipasi seluruh pelaku pembangunan. Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) disusun dengan cara meninjau keserasian antara rancangan Renja SKPD dengan aspirasi masyarakat, dimana outputnya digunakan untuk pemutakhiran rancangan RKPD Kabupaten Sumenep.

Rencana Kerja SKPD Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumenep disusun sebagai penjabaran program-program serta arahan kebijakan yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Perubahan DPMPTSP Kabupaten Sumenep periode 2022 – 2026, serta memperhatikan perkembangan kebutuhan prioritas pada tahun 2024.

Perencanaan pembangunan bukan sekedar memanfaatkan dan membagi habis anggaran, namun yang terpenting adalah menjawab kebutuhan pembangunan sesuai arahan dan prioritas yang ditetapkan dalam RKPD. Perencanaan pembangunan merencanakan pendapatan SKPD dan juga pemanfaatan atau pengeluaran dari pendapatan tersebut.

Akhir kata semoga Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumenep ini dapat dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) untuk program program dan kegiatan yang akan dilaksanakan tahun 2024.

Sumenep, Juli 2023

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU
SELAKU KETUA KELOMPOK KERJA IV
DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SUMENEP



Dr. R. ABD. RAHMAN RIADI, S.E., M.M.

Pembina Utama Muda

NIP. 19710125 199503 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I	PENDAHULUAN	1
	1.1 Latar Belakang	1
	1.2 Landasan Hukum	2
	1.3 Maksud dan Tujuan	5
	1.4 Sistematika Penulisan	5
BAB II	HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU....	9
	2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu Dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.....	9
	2.2 Analisa Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	42
	2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	78
	2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	81
	2.5 Penelaahan Usulan program Kegiatan Masyarakat	100
BAB III	TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	108
	3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan	108
	3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah.....	109
BAB IV	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	116
	4.1 Program dan Kegiatan	117
	4.2 Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah	132
	4.3 Prioritas Pembangunan	132
	4.4 Pencapaian Standart Pelayanan Minimal (SPM)	134
	4.5 Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU)	137
BAB V	PENUTUP	157

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Realisasi Belanja Tidak Langsung TA. 2022	10
Tabel 2.2	Belanja Langsung TA.2022	11
Tabel 2.3	Realisasi Program dan Kegiatan	17
Tabel T-C.29	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 Kabupaten Sumenep	34
Tabel T-C.30	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja Kabupaten Sumenep	51
Tabel T-C.31	Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 Kabupaten Sumenep	83
Tabel T-C.32	Usulan Program Dan Kegiatan Dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024 Kabupaten Sumenep	100
Tabel 3.2.1	Tujuan dan Sasaran RENSTRA	110
Tabel 3.2.2	Prioritas dan Sasaran Perangkat Daerah	112
Tabel 3.2.3	Tujuan Perangkat Daerah	113
Tabel 3.2.4	Sasaran Perangkat Daerah	114
Tabel 3.2.5	Indikator Kinerja Utama (IKU)	115
Tabel T-C.33	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025 Kabupaten Sumenep	118
Tabel 4.2	Realisasi dan Capaian Kinerja atas Target Kinerja Sasaran Renstra Tahun 2022	132
Tabel 4.3	Keterkaitan Prioritas Pembangunan daerah dengan Program Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024	133
Tabel 4.4	Capaian Standart Pelayanan Minimal (SPM)	134
Tabel 4.5	Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)	137
Tabel 4.5.1	Sasaran dan Program Kegiatan	139
Tabel 4.5.2	Rekapitulasi Program Kegiatan berdasarkan Prioritas Pembangunan Tahun 2024	141
Tabel 4.5.3	Kelompok Sasaran dan Pagu Indikatif	144

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam rangka memenuhi amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yaitu upaya memantapkan implementasi mekanisme perencanaan dan penganggaran daerah secara partisipatif maka diperlukan komitmen dan konsistensi dari berbagai pihak (stakeholder) yang lebih solid di berbagai lini pengambilan keputusan. Hal ini penting dan perlu mendapat perhatian luas sehubungan dengan upaya-upaya pemantapan pelaksanaan otonomi daerah dan akuntabilitas pemerintahan daerah.

Sistem perencanaan pembangunan nasional dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 mencakup lima pendekatan dalam seluruh rangkaian perencanaan, yaitu : politik, teknokratik, partisipatif, atas-bawah (top-down) dan bawah-atas (bottom-up). Perencanaan pembangunan tersebut secara garis besar dilaksanakan melalui empat (4) tahapan yang diselenggarakan secara berkelanjutan sehingga secara keseluruhan membentuk satu siklus perencanaan yang utuh yakni :

- (1) penyusunan rencana;
- (2) penetapan rencana;
- (3) pengendalian pelaksanaan rencana; dan
- (4) evaluasi pelaksanaan rencana.

Salah satu dokumen rencana pembangunan yang wajib disusun setiap tahun adalah Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD), yaitu dokumen perencanaan satuan kerja perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Pada Bab II pasal 7 (2) UU No 25 Tahun 2004 telah dijelaskan bahwa Renja-SKPD disusun dengan berpedoman kepada Renstra SKPD dan mengacu kepada RKPD, memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah menyiapkan Renja-SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mengacu kepada rancangan awal RKPD (Rencana Kerja Pembangunan Daerah). Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah juga bertanggung jawab untuk melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan Satuan Kerja Perangkat Daerah periode sebelumnya.

1.2. Landasan Hukum

Dokumen Renja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumenep Tahun 2024 disusun dengan merujuk pada sejumlah peraturan antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan

- Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 114);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 73);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 225);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Di Kawasan Gresik-Bangkalan-Mojokerto-Tengger-Semeru, Serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan;
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah Kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan;
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Ser E);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sumenep 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2011 Nomor 9);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 12 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumenep Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2013 Nomor 10);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumenep 2021-2026 (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumenep 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2017 Nomor 6);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2021 Nomor 1).
24. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 16 Tahun 2018 tentang Penanaman Modal
25. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 34 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja Kabupaten Sumenep
26. Peraturan Bupati Kabupaten Sumenep Nomor 22 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Penerbitan Perizinan Kabupaten Sumenep.
27. Peraturan Bupati Kabupaten Sumenep Nomor 19 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2024.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Rencana Kerja untuk memberikan gambaran mengenai kebijakan, program dan kegiatan beserta indikator kinerja dan pagu indikatif dari masing-masing program kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumenep yang mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sumenep Tahun 2024.

Tujuan disusunnya Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja OPD) Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumenep Tahun 2024 adalah :

1. Menyediakan dokumen perencanaan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk jangka 1 (satu) tahun, yaitu tahun 2024.
2. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efektif, efisien, berkeadilan dan berkelanjutan dalam rangka pelaksanaan pembangunan tahunan daerah yang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumenep.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja OPD) Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumenep disusun sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017, sistematika penulisan renja OPD adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumenep agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1. LATAR BELAKANG

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumenep, Renja K/L dan Renja Provinsi Kabupaten/Kota serta tindak lanjutnya dengan proses Penyusunan RAPBD

1.2. LANDASAN HUKUM

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan OPD serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran OPD.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan penyusunan Renja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja Kabupaten Sumenep.

1.4. SISTEMATIKA PENYUSUNAN RENJA OPD

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja OPD serta susunan dan garis besar isi dokumen

BAB II HASIL EVALUASI RENJA OPD TAHUN LALU

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA OPD

Memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun lalu (Tahun 2022) dan prakiraan capaian tahun berjalan

(Tahun 2024), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja OPD sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra OPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja OPD tahun-tahun sebelumnya.

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN OPD

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan OPD berdasarkan indikator kinerja kunci (IKK) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008.

Jenis indikator yang dikaji disesuaikan dengan tujuan dan fungsi masing-masing OPD, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI OPD

- a. Berisikan mengenai sejauhmana tingkat kinerja pelayanan OPD dan hal kritis yang terkait dalam rangka pencapaian kinerja pembangunan.
- b. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD
- c. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional, seperti NSPK, SPM dan SDGs
- d. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan perangkat daerah
- e. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

2.5 PENELAHAAN USULAN PROGRAM KEGIATAN MASYARAKAT

BAB III TUJUAN DAN SASARAN OPD

3.1. TELAHAAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA OPD

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra OPD.

3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN

Berisikan penjelasan mengenai faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, meliputi jumlah program dan kegiatan, sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan, total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN OPD

BAB V PENUTUP

Berisikan catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun ketersediaan anggaran sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumenep (RENJA OPD) adalah penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja Kabupaten Sumenep itu sendiri. Tercapai atau tidaknya pelaksanaan program dan kegiatan yang telah disusun dapat dilihat dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumenep menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran kinerja sasaran dari hasil yang telah diraih atau dilaksanakan pada tahun 2022 dan perkiraan target tahun 2024

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.

Program tahun lalu adalah program yang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja Kabupaten Sumenep pada tahun 2022. Program-program tersebut dilaksanakan berdasarkan Renstra Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja Kabupaten Sumenep Tahun 2022-2026, sebagai berikut :

a. Urusan Wajib Penanaman Modal yang terdiri dari :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
3. Program Promosi Penanaman Modal
4. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
5. Program Pelayanan Penanaman Modal
6. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal

terdiri dari 6 (enam) program, 13 (tiga belas) kegiatan dengan 29 (dua puluh sembilan) sub kegiatan telah dilaksanakan dengan efektif dan efisien serta pencapaian kinerja kegiatan rata-rata 91,32% (per 31 Desember 2022).

b. Urusan Ketenagakerjaan yang terdiri dari :

1. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja
2. Program Penempatan Tenaga Kerja,

3. Program Hubungan Industrial

4. Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi

terdiri dari 4 (empat) program, 8 (delapan) kegiatan, dan 10 (sepuluh) sub kegiatan.

Dibawah ini diuraikan secara terperinci urusan yang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja Kabupaten Sumenep Tahun 2022, sebagai berikut:

a. Belanja Tidak Langsung

Belanja Tidak Langsung, merupakan pengeluaran kegiatan rutin yang terdiri dari Belanja Pegawai. Belanja Tidak Langsung TA. 2020 sebesar **Rp. 7.343.944.895,-** dan realisasinya sebesar **Rp. 6.832.892.503,- (93,04%)** dengan perincian sebagai berikut :

Tabel 2.1
Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan TA. 2022

No	Pos Belanja	Anggaran Perubahan APBD 2022	Realisasi Keuangan SPJ	%
	BELANJA TIDAK LANGSUNG	7.343.944.895	6.832.892.503	93,04
	BELANJA PEGAWAI	7.343.944.895	6.832.892.503	93,04
I	Gaji dan Tunjangan	4.491.686.400	4.316.742.319	96,11
1	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	3.566.175.500	3.423.542.627	96,00
2	Tunjangan Keluarga	335.378.000	321.088.026	95,74
3	Tunjangan Jabatan	101.495.500	99.020.000	97,56
4	Tunjangan Fungsional	161.300.000	161.300.000	100
4	Tunjangan Fungsional Umum	115.675.000	108.850.000	94,10
5	Tunjangan Beras	200.124.000	193.433.820	96,66
6	Tunjangan PPh	11.489.400	9.463.913	82,37
7	Pembulatan Gaji	49.000	43.933	89,66
II	Tambahan Penghasilan PNS	2.665.467.245	2.339.578.939	87,77
1	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	2.665.467.245	2.339.578.939	87,77
2	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin	18.500.624	18.500.621	100,00

No	Pos Belanja	Anggaran Perubahan APBD 2022	Realisasi Keuangan SPJ	%
	Mendirikan Bangunan			
3	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Usaha Perikanan	4.106.252	4.106.250	100
4	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	155.700.000	147.100.000	93,44
5	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Mendirikan Bangunan	7.115.624	7.115.624	100
6	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Usaha Perikanan	1.368.750	1.368.750	100
7	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Mendirikan Bangunan	2.846.250	2.846.250	100
	BELANJA TIDAK LANGSUNG	7.343.944.895	6.832.892.503	93,04

b. Belanja Langsung

Belanja Langsung terdiri dari 3 komponen, yaitu :

1. Urusan Penanaman Modal terdiri dari 5 Program dan 6 (enam) kegiatan dan 11 (sebelas) sub kegiatan pembangunan dengan jumlah anggaran sebesar **Rp. 1.480.120.385,-** realisasi belanja **Rp. 1.294.118.420,- (87,43%)**
2. Urusan Ketenagakerjaan terdiri dari 3 (enam) Program dan 9 (sembilan) sub kegiatan pembangunan dengan jumlah anggaran sebesar **Rp. 21.822.987.758,-** realisasi belanja **Rp. 19.793.091.714,- (90,69%)**
3. Urusan Administrasi terdiri dari 1 (satu) program, 6 (enam) kegiatan dan 17 (tujuh belas) sub kegiatan pembangunan dengan jumlah anggaran sebesar **Rp. 8.618.678.264,-** realisasi belanja **Rp. 8.063.623.807,- (93,56%).**

Dari ke 3 komponen diatas bahwa total pagu Belanja Langsung sebesar **Rp. 31.921.786.407,-** realisasi belanja **Rp. 29.150.833.941,- (91,32%)** dengan perincian berikut ini.

Tabel 2.2
Belanja Daerah TA. 2022

NO	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
	BELANJA LANGSUNG	24.577.841.512	22.3147.941.438	90,80
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.274.733.369	1.230.731.304	96,55
I.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.553.000	5.552.600	99,99
I.1.1	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5.553.000	5.552.600	99,99
I.2	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	65.166.000	57.704.830	88,55
I.2.1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	46.046.000	45.093.550	97,93
I.2.2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	19.120.000	12.611.280	65,96
I.3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	150.512.615	132.459.780	88,00
I.3.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.152.625	6.152.500	100
I.3.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3.240.950	3.235.000	99,82
I.3.3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	25.714.000	24.047.500	93,52
I.3.4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	11.234.000	11.234.000	100
I.3.5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	47.760.000	31.538.600	66,04
I.3.6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	29.128.000	29.056.330	99,75
I.3.7	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	27.283.040	27.195.850	99,68
I.4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	769.626.540	751.688.750	97,67
I.4.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.172.000	2.158.000	99,36
I.4.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	139.056.000	122.389.060	88,01
I.4.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	628.398.540	627.141.690	99,80
I.5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	198.335.514	198.002.094	99,83

NO	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
I.5.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	37.250.000	37.027.169	99,40
I.5.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	26.449.000	26.342.125	99,60
I.5.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	134.636.514	134.632.800	100
I.6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	82.693.450	82.477.000	99,73
I.6.1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	82.693.450	82.477.000	99,73
	URUSAN PENANAMAN MODAL	1.116.975.168	1.065.810.680	95,42
II	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	90.620.650	88.787.438	97,98
II.1	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	22.234.000	189.200.480	97,40
II.1.1	Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	22.234.000	21.657.000	97,40
II.2	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	68.386.650	189.200.480	98,16
II.2.1	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	68.386.650	67.138.438	98,16
III	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	97.901.500	96.657.133	98,73
III.1	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	97.901.500	96.657.133	98,73
III.1.1	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	97.901.500	96.657.133	98,73
IV	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	663.374.955	648.870.372	97,81
IV.1	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	663.374.955	648.870.372	97,81
IV.1.1	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	616.260.605	608.499.072	98,74
IV.1.2	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan	41.345.950	34.616.300	83,72

NO	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
IV.1.3	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	5.768.400	5.755.000	99,77
V	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	567.817.880	404.215.939	71,19
V.1	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	567.817.880	404.215.939	71,19
V.1.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	50.820.000	21.160.479	41,64
V.1.2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	224.494.985	177.209.884	78,94
V.1.3	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Moda	292.502.895	205.845.576	70,37
VI	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	60.405.400	55.587.538	92,02
VI.1	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	60.405.400	55.587.538	92,02
VI.1.1	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	60.405.400	55.587.538,00	92,02
	URUSAN KETENAGAKERJAAN	1.116.975.168	1.065.810.680	95,42
I.	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	489.339.984	45.520.100	99,36
I.1	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	451.906.184	448.689.437	99,30
I.1.1	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	451.906.184	448.689.437	99,30
I.2	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	37.433.800	45.520.100	96,22
I.2.1	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	37.433.800	36.018.800	96,22
II	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	21.088.842.950	19.078.539.600	90,47
II.1	Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	21.016.388.600	19.007.233.600	90,44

NO	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
II.1.1	Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja	16.505.585.694	15.900.698.194	96,33
II.1.2	Perluasan Kesempatan Kerja	4,510,802,906	3.106.535.406	68,83
II.2	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	55.647.100	55.182.100	99,16
II.2.1	Job Fair/Bursa Kerja	55.647.100	55.182.100	99,16
II.3	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	16.807.250	16.123.900	95,93
II.3.1	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	16.807.250	16.123.900	95,93
III	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	223.484.824	215.452.790	96,41
III.1	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	40.671.000	40.458.500	99,48
III.1.1	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	40.671.000	40.458.500	99,48
III.2	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	182.813.824	174.994.290	95,72
III.2.1	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	82.820.224	75.000.690	90,56
III.2.2	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	99.993.600	99.993.600	100
IV	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	21.320.000	189.200.480	99,49
IV.1	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	21.320.000	189.200.480	99,49
IV.1.1	Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	21.320.000	189.200.480	99,49

Belanja Langsung dalam anggaran pembangunan berbasis kinerja bukanlah semata-mata untuk mengoperasionalkan Belanja Modal yang diinterpretasikan sebagai belanja administrasi proyek, melainkan kegiatan non fisik yang dilaksanakan dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan yang lebih luas. Dalam indikator input seluruh program menunjukkan hasil pengukuran (88,30%).

Tabel 2.3
 Realisasi Program dan Kegiatan Tahun 2022
 DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA

No	Urusan Pemerintahan	Uraian Program / Kegiatan / Sub kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalahan	Solusi
1	2	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1		PENANAMAN MODAL								
1		PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA								
		Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi								
		Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah peserta yang dilatih	Org	81	81	451.906.184	442.689.437		
		Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta								
		Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah pembinaan lembaga pelatihan kerjaswasta	Keg	40	40	37.433.800	36.018.800		

No			Urusan Pemerintahan	Uraian Program / Kegiatan / Sub kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalahan	Solusi
1			2	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2				PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA								
	1			Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota								
		1		Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja	Peningkatan kualitas sarana prasarana pelayanan antarkerja	Prosentase	20	15	16.505.585.694	15.900.698.194	Jumlah proposal penerima Pokir yang masuk tidak sesuai dengan target penerima Pokir, sehingga realisasi menyesuaikan dengan jumlah Proposal yang masuk	Akan dilakukan penertiban penerima Pokir harus menyesuaikan dengan jumlah proposal yang masuk pada tahun-tahun selanjutnya
		2		Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah pencari kerja yang mendaftar	Org	750	450	4.510.802.906	3.106.535.406	Jumlah proposal penerima Pokir yang masuk tidak sesuai dengan target penerima Pokir, sehingga realisasi menyesuaikan dengan jumlah Proposal yang masuk	Akan dilakukan penertiban penerima Pokir harus menyesuaikan dengan jumlah proposal yang masuk pada tahun-tahun selanjutnya
	2			Pengelolaan Informasi Pasar Kerja								
		1		Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah perusahaan pesertajob fair	Perusahaan	50	25	55.647.100	55.182.100	Jumlah perusahaan peserta Job Fair hanya 25 perusahaan yang berpartisipasi yang artinya hanya 25 perusahaan yang membuka lowongan pekerjaan, akan tetapi animo pencari kerja sangat baik dengan dibuktikan jumlah	Untuk tahun selanjutnya akan dilakukan pendekatan melalui media social, cetak dan elektronik jauh sebelum pelaksanaan terutama bagi perusahaan di luar kota (jawa timur)

No			Urusan Pemerintahan	Uraian Program / Kegiatan / Sub kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalahan	Solusi
1			2	5	6	7	8	9	10	11	12	13
											pencari kerja mencapai 1.200 orang	
	3			Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota								
		1		Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Memfasilitasi Pra dan Purna PMI	Org	50	50	16.807.250	16.123.900		
	3			PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL								
	1			Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk								
		1		Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Jumlah perusahaan yang membentuk LKS Bipartit	Perusahaan	20	20	40.671.000	40.458.500		
	2			Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota								
		1		Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah ketenagakerjaan bekerja	Keg	21	21	82.820.224	75.000.690		

No			Urusan Pemerintahan	Uraian Program / Kegiatan / Sub kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalahan	Solusi
1			2	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2		Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Org	1.984	1.984	99.993.600	99.993.600		
4				Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah Kabupaten/kota								
	1			Perencanaan ,Penganggaran dan Evaluasi kinerja Perangkat Daerah								
		1		Koordinasi dan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realiasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realiasi Kinerja SKPD yang disusun	dokumen	4	4	5.553.000	5.552.600		
	2			Administrasi Keuangan Perangkat daerah								
		1		Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah ASN yang diberi gaji dan tunjangan	ASN	32	32	7.346.791.145	6.837.913.753	Gaji dan Tunjangan ASN di sediakan	
	3			Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah								

No		Urusan Pemerintahan	Uraian Program / Kegiatan / Sub kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalahan	Solusi
1		2	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	1		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta atributnya	Jumlah stel pakaian dinas dan atribut yang disediakan	stel	54	54	46.046.000	45.093.550		
	2		Pendidikan dan Pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Jumlah pegawai yang mengikuti diklat/pelatihan/bimtek	Orang	5	3	19.120.000	12.611.280	Diklat kepemimpinan untuk tahun 2022 DPMPSTP dan Naker tidak ada, hanya Bimtek	
	4		Administrasi umum Perangakat daerah								
	1		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan dan komponen listrik yang disediakan	item	7	7	6.152.625	6.152.500		
	2		Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	unit	13	13	3.240.950	3.235.000		
	3		Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah tersedianya ATK dan tersedianya mamim rapat	item	19	19	25.714.000	24.047.500		
	4		Penyediaan barang cetakan dan pengadaan	Jumlah barang cetak dan pengadaan yang diadakan	item	5	5	11.234.000	11.234.000		
	5		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah bacaan dan perundangan yang disediakan	exemplar	736	730	47.760.000	31.538.600	Terdapat rekening belanja yang tidak mencapai target karena pada rekening belanja tersebut merupakan kegiatan pendukung Job Fair, yang seharusnya dilakukan PAK	Akan dilakukan perencanaan yang tepat waktu terhadap rekening belanja yang akan dilakukan perubahan anggaran pada tahun berkenaan

No			Urusan Pemerintahan	Uraian Program / Kegiatan / Sub kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalahan	Solusi
1			2	5	6	7	8	9	10	11	12	13
											terhadap perubahan belanja tersebut	
		6		Penyelenggaraa Rapat Koordinasi dan Konsultasi skpd	Jumlah Laporan Penyelengaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan	37	37	29.128.000	29.056.330.		
		7		Penatausahaan arsip dinamis pada skpd	Jumlah meter lari arsip yang disediakan	meter	6	6	27.283.040	27.195.850		
	5			Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah								
	1	1		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	9	9	82.693.450	82.477.000		
	6			Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah								
		1		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat menyurat yang diadministrasikan	Surat	2187	2257	2.172.000	2.158.000		
		2		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah waktu layanan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Bulan	12	12	139.056.000	122.389.060	Belanja Listrik dan Telepon disedian setiap tahunnya	
		3		Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah tersedianya Tenaga kerja Non ASN	orang	10	10	628.398.540	627.141.690	Jumlah target sasaran tidak sesuai dengan jumlah yang ada	Target perlu penyesuaian dengan realitas kebutuhan Non

No			Urusan Pemerintahan	Uraian Program / Kegiatan / Sub kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalahan	Solusi
1			2	5	6	7	8	9	10	11	12	13
												PNS yang ada
	7			Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah								
		1		penyediaan jasa Pemeliharaan biaya pemeliharaan pajak,dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah kendaraan dinss operasional /lapangan yang dipelihara dan berizin	unit	16	16	37.250.000	37.027.169		
		2		Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Peralatan kantor yang dipelihara	unit	20	20	26.449.000	26.342.125		
		3		Pemeliharaan rehabilitasigedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah luasan gedung yang di rehab/ dipelihara	M2	1666,6	1666,6	134.636.514	134.632.800		
5				PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL								
	1			Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota								
		1		Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Moda	Jumlah PERKADA Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan PenanamanMod al	Perkada	1	1	22.234.000	21.657.000		

No		Urusan Pemerintahan	Uraian Program / Kegiatan / Sub kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalahan	Solusi
1		2	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	2		Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota								
		1	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Tersedianya Peta Potensi dan Peluang Investasi	Dokumen	1	1	68.386.650	67.130.438		
6			PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL								
	1		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota								
		1	Pelaksanaan kegiatan promosi penanaman modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan promosi penanaman modal yang dilakukan	Kegiatan	4	4	97.901.500	96.657.133		
7			PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL								
	1		Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota								
		1	Penyediaan pelayanan terpadu perizinan dan nonperizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	Jumlah Nomor Induk Berusaha (NIB) yang berlaku efektif	NIB	5958	6440	616.260.605	608.499.072		

No			Urusan Pemerintahan	Uraian Program / Kegiatan / Sub kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalahan	Solusi
1			2	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2		Pemantauan pemenuhan komitmen perizinan dan nonperizinan penanaman modal	Jumlah Pelaku Usaha Yang Memenuhi Komitmen Izin Usaha	Pelaku usaha	27	27	41.345.950	34.616.300		
		3		Penyediaan layanan konsultasi dan pengelolaan pengaduan masyarakat terhadap terpadu perizinan dan non perizinan pelayanan	Jumlah Pengaduan yang selesai ditindak lanjuti	Pengaduan	10	9	5.768.400	5.755.000	Dari target 10 pengaduan pada tahun 2022 hanya 9 pengaduan yang masuk dan dilakukan tindak lanjut terhadap pengaduan tersebut	Setiap pengaduan yang masuk akan segera ditindaklanjuti terhadap permasalahan yang dilaporkan oleh tim pengaduan perizinan
8				PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL								
	1			Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota								
		1		Koordinasi dan sinkronisasi pemantauan pelaksanaan penanaman modal	Jumlah Dokumen Profil Pelaku Usaha Yang Dipantau	Dokumen	8	4	50.820.000	21.160.479	Jadual pelaksanaan kegiatan DAK dan DAU TP3 hampir selalu bersama sehingga pelaksanaan kegiatan tidak maksimal serapannya	Perlu perencanaan yang matang terhadap program kegiatan prioritas dengan kegiatan pendamping

No			Urusan Pemerintahan	Uraian Program / Kegiatan / Sub kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalahan	Solusi
1			2	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2		koordinasi dan sinkronisasi pembinaan pelaksanaan penanaman modal	Jumlah Pelaku Usaha yang Menjadi Peserta Pembinaan/Sosialisasi Pelaksanaan Penanaman Modal	Pelaku usaha	216	216	224.494.985	177.209.884	Jadual pelaksanaan kegiatan DAK dan DAU TP3 hampir selalu bersama sehingga pelaksanaan kegiatan tidak maksimal serapannya	Perlu perencanaan yang matang terhadap program kegiatan prioritas dengan kegiatan pendamping
		3		Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan penanaman modal	Jumlah Dokumen Berita Acara Hasil Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	dokumen	20	13	.292.502.895	205.845.576	Jadual pelaksanaan kegiatan DAK dan DAU TP3 hampir selalu bersama sehingga pelaksanaan kegiatan tidak maksimal serapannya	Perlu perencanaan yang matang terhadap program kegiatan prioritas dengan kegiatan pendamping
9				PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL								
	1			Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								
		1		Pengolahan, penyajian dan pemanfaatan data informasi perizinan dan nonperizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Dimanfaatkan oleh Pemangku Kepentingan	Data	4	2	60.405.400	55.587.538	Pelaksanaan Refocusing anggaran pada sub kegiatan ini membuat beberapa sub belanja tidak bisa dilaksanakan	Perlu penyesuaian prioritas pelaksanaan kegiatan pada sub kegiatan tersebut
				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI								
10				PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI								

No			Urusan Pemerintahan	Uraian Program / Kegiatan / Sub kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalahan	Solusi
1			2	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	1			Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota								
		1		Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Memfasilitasi Identifikasi Pendaftaran dan Seleksi Calon Transmigrasi	Kepala Keluarga	15	15	21.320.000	20.391.087		

Perkiraan Pencapaian Tahun Anggaran 2023

Pada tahun 2023 Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja Kabupaten Sumenep melaksanakan 8 (delapan) Program, 17 (tujuh belas) kegiatan dan 33 (tiga puluh tiga) sub kegiatan, sebagaimana terlampir. Alokasi Anggaran untuk tahun 2023 pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja Kabupaten Sumenep adalah sebesar Rp. 11.422.364.296,00. Diharapkan pada tahun 2023 keberhasilan kinerja mencapai 93%.

Berdasarkan hasil yang diperoleh terhadap program dan kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2022 serta perkiraan capaian program dan kegiatan tahun 2023, dapat dikemukakan beberapa permasalahan yang ada dalam pelaksanaan program dan kegiatan Berdasarkan hasil yang diperoleh terhadap program dan kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun lalu yaitu sebagai berikut:

1. Permasalahan terkait dengan pencapaian target kinerja :

A. Urusan Penanaman Modal

- a. Adanya kesenjangan pembangunan sarana prasarana fisik antara daratan dengan kepulauan).
- b. Minimnya ketersediaan sarana telekomunikasi / informatika untuk daerah daratan yang jauh dari ibu kota kecamatan dan kecamatan kepulauan..
- c. Rendahnya daya tarik dan daya saing wilayah.
- d. Rendahnya konektivitas antar sektor sumber daya.
- e. Rendahnya daya saing dan daya tarik sektor UMKM unggulan.
- f. Masih rendahnya pelaksanaan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) secara online oleh pelaku usaha.
- g. Kurangnya dukungan dari masyarakat sekitar dan stakeholder lainnya untuk turut aktif mensukseskan pelaksanaan penanaman modal.
- h. Kurangnya kualitas publikasi data profil potensi/peleuang investasi.
- i. Legalitas lahan tanah tempat usaha yang merupakan bagian penting dari peluang investasi belum clear and clean.
- j. Belum tersusunnya road map potensi investasi.
- k. Belum tersusunnya prospektus potensi investasi berdasarkan skala prioritas yang akan dikembangkan.
- l. Apriori masyarakat terhadap proses penerbitan perizinan.
- m. Tidak terpenuhinya kuantitas SDM untuk kebutuhan ideal dalam memberikan pelayanan perizinan.

- o. Potensi perizinan di kecamatan kepulauan belum tergarap secara optimal karena terkendala biaya akomodasi dan transportasi yang dikeluarkan oleh masyarakat kepulauan begitu besar dalam memenuhi kebutuhannya untuk mendapatkan layanan perizinan.
- p. Adanya ketidak patuhan penggunaan izin oleh pelaku usaha.
- q. Kurangnya kesadaran hukum bagi pelaku usaha untuk melegalkan usahanya.
- r. Masyarakat kurang responsif terhadap penyediaan pelayanan perizinan secara online.
- f. Kabupaten kurang dilibatkan dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh BPKM.

B. Urusan Ketenagakerjaan

- 1. Banyaknya Pengangguran. Disebabkan karena tingginya jumlah penduduk dan tidak diikuti dengan lapangan kerja yang cukup.
- 2. Lapangan Kerja yang Rendah.
- 3. Kualitas Tenaga Kerja yang Rendah.

2. Permasalahan terkait dengan penggunaan anggaran :

- a) Masih kurang optimalnya perencanaan kegiatan yang disusun sehingga masih kurang sistematis, belum terkoordinir dengan baik dan belum komprehensif (mencakup keseluruhan);
- b) Kurang lengkapnya literatur tentang pedoman dan peraturan perundang-undangan yang mendukung pelaksanaan kegiatan;
- c) Belum optimalnya dukungan dana atau anggaran yang diberikan;
- d) Kurang diperhatikannya akurasi data/bahan dan informasi yang diperlukan.
- e) Belum optimalnya pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait.
- f) Adanya refocusing sampai untuk pembiayaan penanganan pandemi Covid-19 dan penyesuaian anggaran terhadap program/kegiatan prioritas OPD dan Kabupaten Sumenep.

Adapun langkah kebijakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab ketidak tercapaian target pelaksanaan program dan kegiatan antara lain :

1. Solusi pemecahan masalah terkait dengan pencapaian target kinerja, adalah

:

- A. Urusan Penanaman Modal

- a. Melakukan pemetaan dan penelitian terhadap potensi/peleuang/proyek investasi dan potensi perizinan.
- b. Meningkatkan kegiatan promosi potensi/peleuang/proyek investasi dan penciptaan kemudahan berinvestasi.
- c. Penyederhanaan syarat administrasi permohonan perizinan.
- d. Penyederhanaan input data pada permohonan perizinan online
- e. Peningkatan kuantitas jam pelayanan dan tempat pelaksanaan operasional mobil pelayanan keliling untuk menjemput bola permohonan perizinan.
- f. Tersedianya tenaga teknis dari OPD teknis yang ditempatkan di front office perizinan.
- g. Sinergitas program dan kegiatan antar OPD untuk mewujudkan peningkatan realisasi penanaman modal.
- h. Menciptakan strategi publikasi yang pesannya sampai ke semua lapisan masyarakat.
- i. Menyediakan road map dan prospektus potensi investasi.
- j. Sosialisasi kepada masyarakat tentang manfaat penanaman modal.
- k. Sosialisasi dan pendampingan kepada pelaku usaha tentang pelaksanaan Laporan Pelaksanaan Penanaman Modal (LKPM) secara online.
- l. Sosialisasi dan pendampingan kepada masyarakat dalam melegalkan usahanya.
- m. Sosialisasi, melaksanakan penerimaan permohonan dan penerbitan perizinan secara manual di kecamatan kepulauan.
- n. Pendampingan kepada masyarakat kepulauan dalam proses melegalkan usahanya melalui Online Single Submission (OSS) RBA.
- o. Pemantauan dan pengawasan operasional pelaku usaha yang sudah memiliki izin.
- p. Pembinaan peningkatan mutu manajemen kepada pelaku usaha.
- q. Komunikasi yang intensif dengan Badan Pertanahan tentang prioritas penyelesaian pertimbangan teknis dan izin lokasi lahan peluang investasi.
- r. Komunikasi yang intensif dengan OPD terkait tentang pengalokasian anggaran prioritas program yang terintegrasi dalam mendukung tercapainya potensi/peleuang/proyek investasi.

- s. Komunikasi yang intensif dengan OPD terkait tentang pengalokasian anggaran prioritas program dalam mendukung tercapainya penanaman modal UMKM yang menghasilkan produk unggulan yang kompetitif.
- t. Penguasaan kebijakan kepada pelaku usaha untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat yang terdampak pelaksanaan penanaman modal.
- u. Pendampingan konektivitas antara pelaku usaha UMKM dengan perusahaan menengah/besar skala regional dan nasional dalam pelaksanaan pengembangan produk, aneka produk dan pangsa pasar.
- v. Pendampingan konektivitas antara Sekolah Menengah Kejuruan dengan perusahaan menengah/besar skala regional dan nasional dalam pelaksanaan pemagangan peserta didik dan perolehan bantuan sarana prasarana praktek pembelajaran.
- w. Penyusunan PERDA tentang pemberian insentif kepada pelaku usaha.
- x. Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SPP) dan Standar Pelayanan Publik (SPP) pelaksanaan pemberian insentif penanaman modal.
- y. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kepada pelaku usaha yang menerima insentif penanaman modal.
- z. Penguasaan sanksi administratif bagi pelaku usaha yang tidak melaksanakan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) secara online.

B. Urusan Ketenagakerjaan

- 1. Meningkatkan mutu tenaga kerja. dengan cara memberikan pelatihan-pelatihan bagi tenaga kerja.
- 2. Memperluas kesempatan kerja.
- 3. Memperbaiki sistem pengupahan.
- 4. Memperbanyak Proyek Magang Bagi Calon Tenaga Kerja.
- 5. Menciptakan Lapangan Pekerjaan yang Luas Bagi Rakyat.
- 6. Meningkatkan Kesejahteraan Tenaga Kerja.
- 7. Mengembangkan Sektor Informal.
- 8. Program Transmigrasi.
- 9. Peningkatan Investasi.

2. Solusi pemecahan masalah terkait dengan penggunaan anggaran :

- a) Sangat diperlukan suatu perencanaan kegiatan yang sistematis, terkoordinir dan komprehensif, dan terpadu.

- b) Penyediaan pedoman dan peraturan perundang-undangan yang mendukung pelaksanaan kegiatan perlu dilakukan secara teliti dan mencari melalui berbagai media yang memungkinkan.
- c) Pengusulan anggaran/dana untuk setiap kegiatan harus sesuai dengan kebutuhan dan didukung oleh dasar hukum serta argumentasi yang representatif.
- d) Pengembangan sistem jaringan informasi dan peningkatan kualitas perpustakaan daerah guna mendukung terwujudnya akurasi data/bahan dan informasi yang diperlukan.
- e) Perlu membina dan menjaga hubungan yang harmonis dengan instansi lain dengan harapan pelaksanaan koordinasi dengan instansi tersebut dapat terlaksana dengan baik.

Tujuan evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun lalu dan pencapaian Renstra OPD adalah untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan OPD dalam melaksanakan program dan kegiatan, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra OPD serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi. Di bawah ini disajikan rekapitulasi evaluasi Renja SKPD sebagaimana Tabel 2.1 di bawah ini.

Tabel T-C. 29
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022
Kabupaten Sumenep

KODE	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Permendagri No 90 Tahun 2019)	Indikator Kinerja Program (outcome) / kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra PD Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target Program RKPD Tahun Berjalan (2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/ Kegiatan Renstra PD s/d Tahun 2026		Catatan				
				Target RKPD Tahun 2022	Realisasi RKPD Tahun 2022 *)	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian	Perkiraan Tingkat Capaian (%)					
1	2	3	4	5	6	7=(6/5)*100	8	9=5+8	10=(9/4)*100	11				
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
2	18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL												
2	18	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya kebutuhansarana danprasarana kantor	100,00	100,00	100,00	100,00	20,00	40,00	40,00			
2	18	01	2	01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja SKPD Tepat Waktu	100,00	100,00	100,00	100,00	12,00	40,00	40,00	
2	18	01	2	01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	20	4	4	100,00	4	12	60,00

KODE						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Permendagri No 90 Tahun 2019)	Indikator Kinerja Program (outcome) / kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra PD Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target Program RKPD Tahun Berjalan (2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/ Kegiatan Renstra PD s/d Tahun 2026		Catatan
									Target RKPD Tahun 2022	Realisasi RKPD Tahun 2022 *)	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian	Perkiraan Tingkat Capaian (%)	
1						2	3	4	5	6	7=(6/5)*100	8	9=5+8	10=(9/4)*100	11
2	18	01	2	02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	60	12,00	12,00	100,00	12	24	40,00	
2	18	01	2	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang diberi gaji dan tunjangan	360	32	32	100,00	71	174	48,33	
2	18	01	2	05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Jenis layanan kepegawaian yang disediakan	25	5	2	40,00	5	10	60,00	
2	18	01	2	05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	846	54	54	100,00	71	125	14,77	
2	18	01	2	05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	31	5	4	100,00	6	16	51,61	
2	18	01	2	06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	252	49	48	97,75	50	99	39,28	
2	18	01	2	06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	132	7	7	100,00	26	33	25,00	
2	18	01	2	06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	60	13	13	100,00	12	25	41,66	
2	18	01	2	06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	60	19	17	89,47	12	31	51,66	

KODE	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Permendagri No 90 Tahun 2019)	Indikator Kinerja Program (outcome) / kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra PD Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target Program RKPD Tahun Berjalan (2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/ Kegiatan Renstra PD s/d Tahun 2026		Catatan					
				Target RKPD Tahun 2022	Realisasi RKPD Tahun 2022 *)	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian	Perkiraan Tingkat Capaian (%)						
1	2	3	4	5	6	$7=(6/5)*100$	8	9=5+8	$10=(9/4)*100$	11					
2	18	01	2	06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	16.789	5	5	100,00	5	10	0,059	
2	18	01	2	06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	2.750	736	736	100,00	546	1.282	46,61	
2	18	01	2	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	657	37	37	100,00	131	168	25,57	
2	18	01	2	06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	4	6	6	100,00	4	10	250,00	
2	18	01	2	07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang diadakan	382	70	70	100,0	76	146	38,22	
2	18	01	2	07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	5	0	0	0,00	1	1	20,00	
2	18	01	2	07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	337	0	0	0,00	67	67	19,88	
2	18	01	2	07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	40	5	5	100,00	8	13	32,50	
2	18	01	2	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Layanan Jasa yang Disediakan	15	3	3	100,00	3	6	40,00	

KODE						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Permendagri No 90 Tahun 2019)	Indikator Kinerja Program (outcome) / kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra PD Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target Program RKPD Tahun Berjalan (2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/ Kegiatan Renstra PD s/d Tahun 2026		Catatan
									Target RKPD Tahun 2022	Realisasi RKPD Tahun 2022 *)	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian	Perkiraan Tingkat Capaian (%)	
1						2	3	4	5	6	7=(6/5)*100	8	9=5+8	10=(9/4)*100	11
2	18	01	2	08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	20.587	2.187	2.617	119,66	2.617	4.804	23,33	
2	18	01	2	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60	12	12	100,00	12	24	40,00	
2	18	01	2	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	60	12	12	100,00	12	24	40,00	
2	18	01	2	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jenis barang yang dipelihara	4,00	4	3	75,00	4	8	200,00	
2	18	01	2	09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	185	16	16	100,00	37	53	28,64	
2	18	01	2	09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	436	0	0	0,00	0	0	00,00	
2	18	01	2	09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	322	20	20	100,00	64	84	26,08	
2	18	01	2	09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10	1.666,6	1.666,60	100,00	2	1.668,6	16.686	
						Operasional UPTD	Jumlah Sarana dan Prasarana Operasioanal yang ada di UPTD	15	0	0	00,00	0	0	0,00	

KODE						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Permendagri No 90 Tahun 2019)	Indikator Kinerja Program (outcome) / kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra PD Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target Program RKPd Tahun Berjalan (2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/ Kegiatan Renstra PD s/d Tahun 2026		Catatan
									Target RKPd Tahun 2022	Realisasi RKPd Tahun 2022 *)	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian	Perkiraan Tingkat Capaian (%)	
1						2	3	4	5	6	7=(6/5)*100	8	9=5+8	10=(9/4)*100	11
						URUSAN PENANAMAN MODAL									
2	18	02				PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase Pelaku Usaha yang mendapatkan Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal	40,00	10,00	10,00	100,00	10,00	20,00	50,00	
2	18	02	2	01		Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha yang mendapatkan Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal	31	5	5	100,00	6	11	35,48	
2	18	02	2	01	01	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah PERKADA Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	5	1	1	100,00	1	2	40,00	
2	18	02	2	01	02	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Pelaku Usaha yang Memanfaatkan Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal sesuai dengan peruntukannya	0	0	0	0,00	0	0	0,00	
2	18	02	2	02		Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Profil Potensi Investasi	18	1	1	100,00	1	6	100,00	

KODE	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Permendagri No 90 Tahun 2019)	Indikator Kinerja Program (outcome) / kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra PD Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target Program RKPd Tahun Berjalan (2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/ Kegiatan Renstra PD s/d Tahun 2026		Catatan					
				Target RKPd Tahun 2022	Realisasi RKPd Tahun 2022 *)	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian	Perkiraan Tingkat Capaian (%)						
1	2	3	4	5	6	$7=(6/5)*100$	8	9=5+8	$10=(9/4)*100$	11					
2	18	02	2	02	01	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya PERKADA RUPMD	0	0	0	0	0	0	0,00	
2	18	02	2	02	02	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Jumlah Obyek Peluang Potensi Investasi Kabupaten Sumenep	5	1	1	100,00	1	2	40,00	
2	18	03				PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase Peningkatan Jumlah Investor	3,79	3,55	2,94	82,81	3,67	7,22	190,50	
2	18	03	2	01		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Media Promosi Penanaman Modal	25	5	5	84,28	5	10	40,00	
2	18	03	2	01	01	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Jumlah Dokumen Rumusan Strategi Promosi Penanaman Modal	5	0	0	0,00	0	0	0,00	
2	18	03	2	01	02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Promosi Potensi Investasi Tingkat Regional / Nasional	24	4	4	100,00	5	9	37,50	
2	18	04				PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Peningkatan Penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB)	3,79	3,55	2,67	75,21	3,67	7,22	190,50	
2	18	04	2	01		Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangn Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Nomor Induk Berusaha (NIB) yang diterbitkan	32.060	6.173	6.440	104,32	6.400	12.573	39,21	

KODE	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Permendagri No 90 Tahun 2019)	Indikator Kinerja Program (outcome) / kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra PD Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target Program RKPd Tahun Berjalan (2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/ Kegiatan Renstra PD s/d Tahun 2026		Catatan					
				Target RKPd Tahun 2022	Realisasi RKPd Tahun 2022 *)	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian	Perkiraan Tingkat Capaian (%)						
1	2	3	4	5	6	7=(6/5)*100	8	9=5+8	10=(9/4)*100	11					
2	18	04	2	01	01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	32.060	6.173	6.440	104,32	6.400	12.573	39,21	
2	18	04	2	01	02	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal	134	22	23	104,54	27	49	36,56	
2	18	04	2	01	03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu	61	10	8	80,00	12	22	36,06	
2	18	04	2	01	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	31	0	0	0,00	0	0	0,00	
2	18	05				PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Prosentase Jumlah Pelaku Usaha Berizin Yang Beroperasi sesuai Izin Usahanya	95,00	88,00	104.32	118,54	90,00	178.00	187,36	
2	18	05	2	01		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Berizin Yang Beroperasi Sesuai Dengan Izin Yang Diterbitkan	32.060	6.173	6.440	104,32	6.400	12.573	39,21	
2	18	05	2	01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	47	8	8	100,00	8	16	34,04	

KODE	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Permendagri No 90 Tahun 2019)	Indikator Kinerja Program (outcome) / kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra PD Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target Program RKPD Tahun Berjalan (2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/ Kegiatan Renstra PD s/d Tahun 2026		Catatan					
				Target RKPD Tahun 2022	Realisasi RKPD Tahun 2022 *)	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian	Perkiraan Tingkat Capaian (%)						
1	2	3	4	5	6	7=(6/5)*100	8	9=5+8	10=(9/4)*100	11					
2	18	05	2	01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	1.451	216	220	108,85	287	503	34,66	
2	18	05	2	01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan	87	20	18	90,00	17	232	56,17	
2	18	06				PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Prosentase Kualitas Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	93	89	100	112,35	87	100	100,00	
2	18	06	2	01		Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Data Realisasi Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan Tepat Waktu	100	89	100	112,35	100	100	100,00	
2	18	06	2	01	01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	25	1	1	100,00	5	6	24,00	

2.2. Analisa Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Untuk mencapai pelayanan yang optimal, pemerintahan daerah selaku penyelenggara urusan pemerintahan harus dapat memproses dan melaksanakan hak dan kewajiban berdasarkan asas-asas pemerintahan yang baik (*Good Governance*) sesuai dengan asas umum penyelenggaraan negara.

2.2.1. Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja Kabupaten Sumenep

Mengacu kepada Peraturan Bupati Sumenep Nomor 34 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja disebutkan bahwa Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja mempunyai tugas “Membantu Bupati melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu dan ketenagakerjaan”

Untuk melaksanakan tugas tersebut, pada pasal 4 angka (2) disebutkan bahwa Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan di bidang penanaman modal dan bidang tenaga kerja;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang penanaman modal dan bidang tenaga kerja;
- c. pelaksanaan perencanaan dan pengembangan iklim, promosi dan publikasi, pengendalian dan penanganan pengaduan, pelayanan perizinan dan noperizinan, pengolahan data dan sistem informasi di bidang penanaman modal;
- d. pelaksanaan pengolahan data dan sistem informasi, penempatan tenaga kerja dan transmigrasi, pelatihan dan produktifitas kerja, serta hubungan industrial dan jaminan sosial di bidang tenaga kerja;
- e. pelaksanaan kajian teknis, monitoring dan evaluasi, pelaporan dibidang penanaman modal dan tenaga kerja;

- f pelaksanaan administrasi ketatausahaan Dinas; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, dengan dibantu oleh seorang Sekretaris, 3 (tiga) Bidang, dan 1 (satu) Kepala Sub Bagian, serta Kelompok jabatan fungsional; sebagaimana struktur organisasi berikut:

Struktur organisasi Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja adalah sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat, membawahi :
 - 1. Sub Bagian Umum, Kearsipan dan Kepegawaian;
 - 2. Kelompok Jabatan Fungsional.
- c. Bidang Pengolahan Data dan Sistem Informasi, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
- d. Bidang Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
- h. Bidang Pelatihan, Produktivitas dan Hubungan Industrial, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
- i. Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan
- j. Kelompok Jabatan Fungsional.

Sesuai Peraturan Bupati Sumenep Nomor 34 tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja Kabupaten Sumenep sebagai berikut :

KEPALA DINAS

- (1) Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan penyusunan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan daerah di Bidang Penanaman Modal dan Bidang Tenaga Kerja.
- (2) Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja Kabupaten Sumenep menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan di bidang penanaman modal dan bidang tenaga kerja;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang penanaman modal dan bidang tenaga kerja;
- c. pelaksanaan perencanaan dan pengembangan iklim, promosi dan publikasi, pengendalian dan penanganan pengaduan, pelayanan perizinan dan noperizinan, pengolahan data dan sistem informasi di bidang penanaman modal;
- d. pelaksanaan kajian teknis, monitoring dan evaluasi, pelaporan dibidang penanaman modal dan tenaga kerja;
- e. pelaksanaan administrasi ketatausahaan Dinas; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

SEKRETARIS

- (1) Sekretariat sebagaimana menyelenggarakan fungsi pelaksanaan administrasi umum, kearsipan, perlengkapan, kepegawaian, program, perencanaan dan keuangan.
- (2) Sekretariat melaksanakan tugas:
 - a. penyusunan dan pengkoordinasian program kerja pelaksanaan tugas sekretariat ;
 - b. penyelenggaraan administrasi surat menyurat, kearsipan dan pembinaan ketatalaksanaan;
 - c. pengolahan, menganalisa dan memformulasikan rencana kebutuhan perlengkapan dan peralatan, serta pelaksanaan keamanan dan kebersihan kantor,serta proses kedudukan hukum kegiatan;
 - d. penyelenggaraan tata usaha kepegawaian yang meliputi pengembangan, peningkatan karir pegawai, kesejahteraan dan pemberhentian pegawai Dinas;
 - e. penyelenggaraan penyusunan rencana anggaran, pengelolaan keuangan serta pertanggungjawabanpelaksanaannya;
 - f. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas bidang;
 - g. pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tatalaksana; dan
 - h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Untuk melaksanakan tugas dimaksud, sekretariat Dinas dibantu oleh:

- (1) Sub Bagian Umum, Kearsipan dan Kepegawaian, mempunyai tugas :
 - a. Menyusun program kerja pelaksanaan tugas umum, kearsipan dan kepegawaian;
 - b. melaksanakan urusan surat menyurat, pengetikan, penggandaan, pendistribusian dan mengelola arsip aktif, arsip inaktif, arsip vital, serta menyerahkan arsip statis ke lembaga kearsipan daerah;
 - c. menginventarisasi barang milik negara dan memelihara peralatan, perlengkapan, keamanan dan kebersihan kantor serta melaksanakan kegiatan keprotokolan dan menyiapkan administrasi pedalanan dinas;
 - d. menyiapkan, menyusun dan melaksanakan tata usaha kepegawaian yang meliputi pengembangan, peningkatan karir pegawai, kesejahteraan dan pemberhentian pegawai di lingkungan Dinas; dan
 - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

BIDANG PENGOLAHAN DATA DAN SISTEM INFORMASI

- (1) Bidang Pengolahan Data dan Sistem Informasi, mempunyai tugas melaksanakan urusan Penyelenggaraan Pengolahan Data dan Sistem Informasi.
- (2) Bidang Pengolahan Data dan Sistem Informasi, menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan dan pengoordinasian program kerja pelaksanaan tugas bidang pengolahan data dan sistem informasi;
 - b. penyusunan kajian kebijakan teknis dan administratif di bidang Pengolahan Data dan Sistem Informasi; dan
 - c. pelaksanaan kebijakan teknis dan administratif dibidang Pengolahan Data dan Sistem Informasi;
 - d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan Pengolahan Data dan Sistem Informasi; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

BIDANG PENEMPATAN DAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA

- (1) Bidang Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja, mempunyai tugas melaksanakan urusan Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja.
- (2) Bidang Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja, menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan dan pengoordinasian program kerja pelaksanaan tugas bidang penempatan dan perluasan kesempatan kerja;
 - b. Pengoordinasian penerbitan pelayanan AK.1 dan penyebarluasan informasi pasar kerja melalui sarana informasi dan media lainnya;
 - c. Pengoordinasian pelaksanaan mekanisme dan fasilitasi penempatan Tenaga Kerja Antar Kota (AKL), Tenaga Kerja Antar Kota Antar Daerah (AKAD) dan Tenaga Kerja Antar Negara (AKAN);
 - d. Pengoordinasian pelayanan pemulangan dan kepulangan TKI/PMI;
 - e. Pengoordinasian pelayanan dan Verifikasi kelengkapan dokumen ketenagakerjaan calon TKI/PMI ke luar negeri;
 - f. Pengoordinasian pelaksanaan dan fasilitasi pembinaan tenaga kerja pola mandiri, penerapan teknologi tepat guna, padat karya suka rela atau pola lain yang mendukung terciptanya perluasan kerja;
 - g. Pengoordinasian pelaksanaan penyuluhan dan sosialisasi pendaftaran dan persiapan pemberangkatan calon transmigrasi; dan
 - h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikau oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

BIDANG PELATIHAN, PRODUKTIVITAS DAN HUBUNGAN INDUSTRIAL

- (1) Bidang Pelatihan, Produktivitas dan Hubungan Industrial, mempunyai tugas melaksanakan urusan pelatihan, produktivitas dan hubungan industrial.
- (2) Bidang Pelatihan, Produktivitas dan Hubungan Industrial, menyelenggarakan fungsi :
 - a. Pelaksanaan penyusunan program dan kegiatan bidang pelatihan, produktivitas dan hubungan industrial;
 - b. Pemverifikasi informasi regulasi bidang pelatihan kerja yang akan

- disebarluaskan kepada lembaga pelatihan keda swasta;
- c. Peningkatan kompetensi sumber daya manusia lembaga pelatihan keda swasta dan pemberian rekomendasi atas permohonan izin lembaga pelatihan kerja swasta;
 - d. Pengoordinasian penyelenggaraan pelatihan dan usaha baru berbasis masyarakat;
 - e. Pengoordinasian pengukuran produktivitas tingkat kabupaten / kota;
 - f. Pengoordinasian pemantauan (surveillance) tingkat produktivitas;
 - g. Pelaksanaan pembinaan lembaga kerjasama bipartit dan tripartit serta memfasilitasi pembentukan dan pemberdayaan lembaga kerjasama Bipartit di perusahaan;
 - h. Pelaksanaan deteksi dini terhadap potensi perselisihan di perusahaan dan penyelesaian perselisihan diluar pengadilan;
 - i. Pelaksanaan penyusunan dan pengusulan penetapan UMK (Upah Minimum Kabupaten), evaluasi terhadap pelaksanaan UMK dan pengembangan kepesertaan program jaminan sosial serta fasilitasi bimbingan atau pembinaan sistem pengupahan; dan
 - j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS

- (1) Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD), merupakan unsur pelaksana teknis operasional Dinas di lapangan;
- (2) UPTD dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

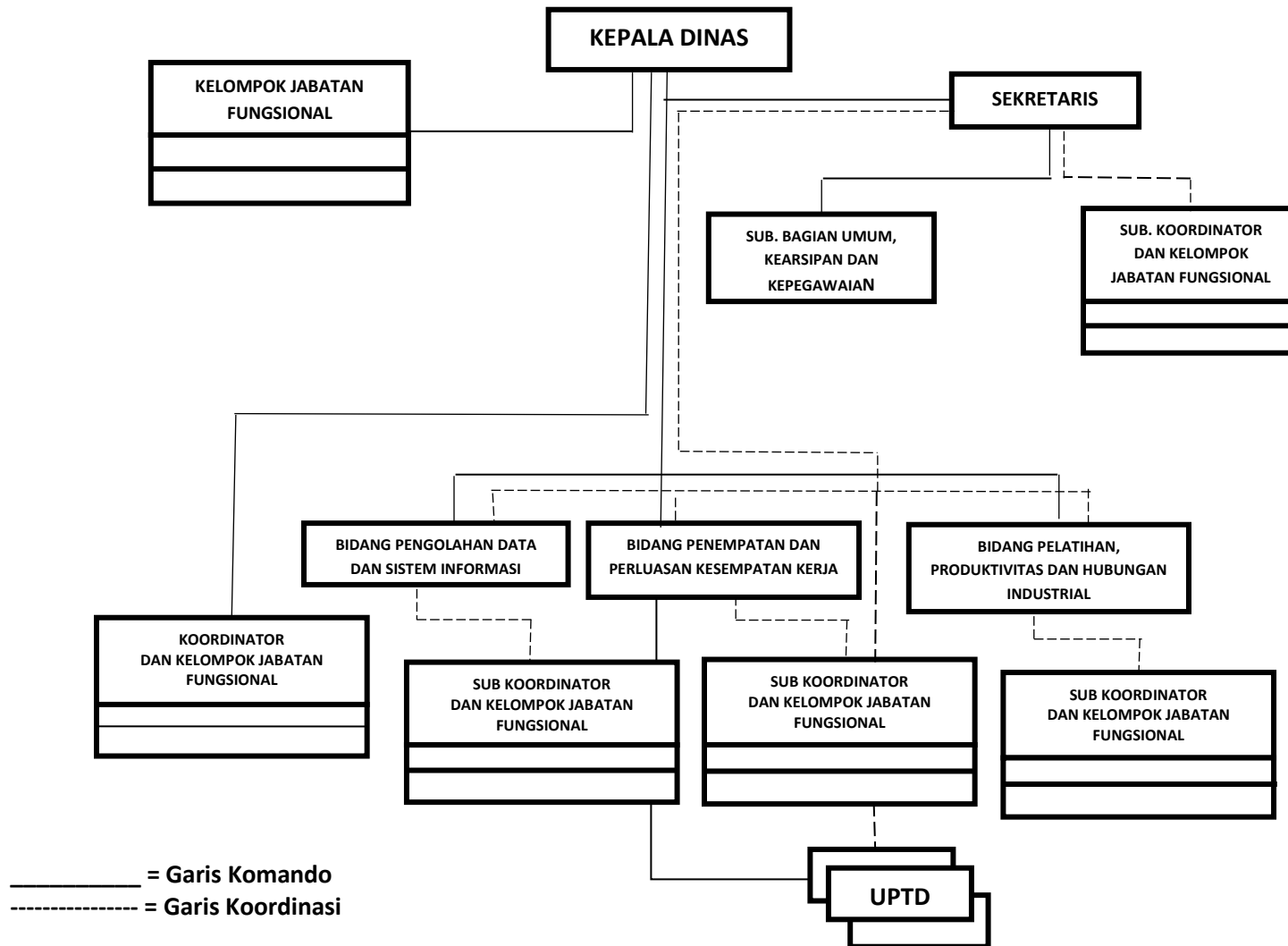
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan perundang-undangan;

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam Kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan bidang keahliannya/ kekampilannya;

- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh koordinator dan/atau sub koordinator pelaksana fungsi pelayanan fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi jabatan pimpinan tinggi pratama;
- (3) Koordinator dan Subkoordinator sebagaimana dimaksud, melaksanakan tugas membantu Pejabat Tinggi Pratama dan Pejabat Administrator dalam penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan pada satu kelompok substansi pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi;
- (4) Koordinator dan Subkoordinator sebagaimana dimaksud ditetapkan oleh pimpinan tinggi pratama;
- (5) Ketentuan mengenai pembagian tugas koordinator dan subkoordinator sebagaimana dimaksud ditetapkan oleh Bupati.

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA



Untuk melaksanakan tugas dan fungsi organisasi Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja Kabupaten Sumenep Tahun 2023 telah disediakan SDM melalui draft Keputusan Bupati, dengan rincian sebagai berikut :

1. Jabatan Struktural

Untuk mengisi jabatan struktural telah dilantik pejabat struktural sebanyak 6 (enam) pegawai Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja Kabupaten Sumenep melalui Keputusan Bupati, dengan rincian sebagai berikut :

1. 1 (satu) Kepala Dinas dengan eselon II-B
2. 1 (satu) Sekretaris dengan eselon III-A
3. 3 (tiga) orang Kepala Bidang setara dengan eselon III-B
4. 1 (satu) orang Kepala Sub Bagian (Subbag Umum, Kearsipan dan Kepegawaian setara dengan eselon IV-A

Sudah barang tentu pengisian penjabat struktural tersebut harus mengakomodasi PNS yang memenuhi syarat (kemampuan, senioritas, pendidikan dan kepangkatannya) baik yang berasal dari Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja Kabupaten Sumenep, maupun yang berasal dari OPD lainnya.

2. Jabatan Fungsional

Kelompok jabatan fungsional merupakan kelompok yang anggotanya mempunyai tugas dan fungsi, keahlian khusus melaksanakan sebagian tugas Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja Kabupaten Sumenep sesuai bidang dan kebutuhan.

Berikut penyajian pencapaian kinerja pelayanan perangkat daerah seperti pada Tabel T-C. 30 sebagai berikut :

Tabel T-C. 30
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Dan Tenaga Kerja
Kabupaten Sumenep

NO.	INDIKATOR (IKU, SPM, IKK)	ANGKA/NILAI TARGET/STANDART (IKU, SPM, IKK)	Target Renstra SKPD					Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
			Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Indikator Kinerja Sasaran											
1.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)		75,05	75,01	75,15	75,21	75,25	75,03	75,12	75,01	75,15	
2.	Prosentase Peningkatan Realisasi Investasi		3,61	3,67	3,73	3,79	3,85	2,75	55,95	3,67	3,73	
3.	Persentase jenis layanan yang diterbitkan lebih cepat dan tepat		85	86	87	87	88	82,81	86,25	86	87	
4.	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Layanan Perizinan dan Non Perizinan		85	86	87	87	88	82,81	86,25	86	87	

Pencapaian Kinerja Dapat Disajikan seperti pada Tabel TC-30

KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (PERMENDAGRI NO 90 TAHUN 2019)	PROGRAM / INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN / INDIKATOR KEGIATAN SUB KEGIATAN / INDIKATOR SUB KEGIATAN	SPM / Standar Nasional	IKK	Target Renstra SKPD					Realisasi Capaian	Proyeksi		Catatan Analisis
					Tahun 2022 (tahun n-1)	Tahun 2023 (tahun n)	Tahun 2024 (tahun n+1)	Tahun 2025 (tahun n+2)	Tahun 2026 (tahun n+3)	Tahun 2022 (tahun n-1)	Tahun 2023 (tahun n)	Tahun 2024 (tahun n+1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
2	18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL			20,00	20,00				20,00			
2	1801	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			20,00	20,00				20,00			
2	1801201	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			12	12				20,00			
2	1801201001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			3	4				0			
2	1801201002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			4	2				0			
2	1801201006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			4	4				4			
2	1801201007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			0	2				0			
2	1801202	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			12	12				20,00			
2	1801202001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			72	71				32			
2	1801202007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan ulanan / Triwulanan / Semesteran			0	12				0			

KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN					PROGRAM / INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN / INDIKATOR KEGIATAN SUB KEGIATAN / INDIKATOR SUB KEGIATAN	SPM / Standar Nasional	IKK	Target Renstra SKPD					Realisasi Capaian	Proyeksi		Catan Analisis
	(PERMENDAGRI NO 90 TAHUN 2019)								Tahun 2022 (tahun n-1)	Tahun 2023 (tahun n)	Tahun 2024 (tahun n+1)	Tahun 2025 (tahun n+2)	Tahun 2026 (tahun n+3)	Tahun 2022 (tahun n-1)	Tahun 2023 (tahun n)	Tahun 2024 (tahun n+1)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						SKPD											
2	1	0	2	0		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			4	4				2			
2	1	0	2	0	0	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai			0	1				0			
2	1	0	2	0	0	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya			54	0				54			
2	1	0	2	0	0	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian			3	3				0			
2	1	0	2	0	0	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			5	5				3			
2	1	0	2	0	1	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			32	32				0			
2	1	0	2	0		Administrasi Umum Perangkat Daerah			1299	1083				20			
2	1	0	2	0	0	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			24	24				7			
2	1	0	2	0	0	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			12	37				13			
2	1	0	2	0	0	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			12	12				19			

KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN					PROGRAM / INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN / INDIKATOR KEGIATAN SUB KEGIATAN / INDIKATOR SUB KEGIATAN	SPM / Standar Nasional	IKK	Target Renstra SKPD					Realisasi Capaian	Proyeksi		Catan Analisis
	(PERMENDAGRI NO 90 TAHUN 2019)								Tahun 2022 (tahun n-1)	Tahun 2023 (tahun n)	Tahun 2024 (tahun n+1)	Tahun 2025 (tahun n+2)	Tahun 2026 (tahun n+3)	Tahun 2022 (tahun n-1)	Tahun 2023 (tahun n)	Tahun 2024 (tahun n+1)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						jumlah paket item makan dan minum yang disediakan			245	3				245			
2	1	0	2	0	0	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			5	5				5			
2	1	0	2	0	0	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			739	1				730			
2	1	0	2	0	0	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			257	121				257			
2	1	0	2	0	1	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD			6	6				6			
2	1	0	2	0		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			20	70				20			
2	1	0	2	0	0	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			0	1				0			
2	1	0	2	0	0	Pengadaan Mebel			50	1				50			
2	1	0	2	0	0	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			16	8				16			
2	1	0	2	0		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			20	3				20			
2	1	0	2	0	0	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			3.187	3.846				3.187			
2	1	0	2	0	0	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			12	12				12			

KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (PERMENDAGRI NO 90 TAHUN 2019)	PROGRAM / INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN / INDIKATOR KEGIATAN SUB KEGIATAN / INDIKATOR SUB KEGIATAN	SPM / Standar Nasional	IKK	Target Renstra SKPD					Realisasi Capaian	Proyeksi		Catan Analisis
					Tahun 2022 (tahun n-1)	Tahun 2023 (tahun n)	Tahun 2024 (tahun n+1)	Tahun 2025 (tahun n+2)	Tahun 2026 (tahun n+3)	Tahun 2022 (tahun n-1)	Tahun 2023 (tahun n)	Tahun 2024 (tahun n+1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Air dan Listrik yang Disediakan											
2	181200	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			17	12				17			
2	181209	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			20	98				20			
2	1812092	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			32	35				32			
2	1812095	Pemeliharaan Mebel			0	30				0			
2	1812096	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			92	33				92			
2	1812099	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			1.668,60	2				1.668,60			
		Operasional UPTD			5	5				5			
2	181	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					20,00	20,00			20,00	20,00	
		Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor					20,00	20,00			20,00	20,00	
		Persentase pemenuhan sarana dan prasarana					20,00	20,00			20,00	20,00	

KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN					PROGRAM / INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN / INDIKATOR KEGIATAN SUB KEGIATAN / INDIKATOR SUB KEGIATAN	SPM / Standar Nasional	IKK	Target Renstra SKPD					Realisasi Capaian	Proyeksi		Cata tan Analisis
	(PERMENDAGRI NO 90 TAHUN 2019)								Tahun 2022 (tahun n-1)	Tahun 2023 (tahun n)	Tahun 2024 (tahun n+1)	Tahun 2025 (tahun n+2)	Tahun 2026 (tahun n+3)	Tahun 2022 (tahun n-1)	Tahun 2023 (tahun n)	Tahun 2024 (tahun n+1)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						perkantoran											
2	1	0	2	0		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				12	12			12	12		
2	1	0	2	0	0	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4	4			4	4		
2	1	0	2	0	0	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				2	2			2	2		
2	1	0	2	0	0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				4	4			4	4		
2	1	0	2	0	0	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2	2			2	2		
2	1	0	2	0		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				12	12			12	12		
2	1	0	2	0	0	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				71	71			71	71		
2	1	0	2	0	0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan ulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD				12	12			12	12		
2	1	0	2	0		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				4	4			4	4		
2	1	0	2	0	0	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				1	1			1	1		
2	1	0	2	0	0	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya				282	282			0	282		

KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN					PROGRAM / INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN / INDIKATOR KEGIATAN SUB KEGIATAN / INDIKATOR SUB KEGIATAN	SPM / Standar Nasional	IKK	Target Renstra SKPD					Realisasi Capaian	Proyeksi		Catatan Analisis
	(PERMENDAGRI NO 90 TAHUN 2019)								Tahun 2022 (tahun n-1)	Tahun 2023 (tahun n)	Tahun 2024 (tahun n+1)	Tahun 2025 (tahun n+2)	Tahun 2026 (tahun n+3)	Tahun 2022 (tahun n-1)	Tahun 2023 (tahun n)	Tahun 2024 (tahun n+1)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	1	0	2	0	0	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian					3	3			3	3	
2	1	0	2	0	0	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi					5	5			5	5	
2	1	0	2	0	1	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan					32	32			32	32	
2	1	0	2	0		Administrasi Umum Perangkat Daerah					100	100			96	100	
2	1	0	2	0	0	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					26	26			24	26	
2	1	0	2	0	0	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					41	41			37	41	
2	1	0	2	0	0	Penyediaan Bahan Logistik Kantor					12	12			12	12	
											3	3			3	3	
2	1	0	2	0	0	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan					6	6			5	6	
2	1	0	2	0	0	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan					1	1			1		
2	1	0	2	0	0	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					126	126			121	126	

KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN					PROGRAM / INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN / INDIKATOR KEGIATAN SUB KEGIATAN / INDIKATOR SUB KEGIATAN	SPM / Standar Nasional	IKK	Target Renstra SKPD					Realisasi Capaian	Proyeksi		Catatan Analisis
	(PERMENDAGRI NO 90 TAHUN 2019)								Tahun 2022 (tahun n-1)	Tahun 2023 (tahun n)	Tahun 2024 (tahun n+1)	Tahun 2025 (tahun n+2)	Tahun 2026 (tahun n+3)	Tahun 2022 (tahun n-1)	Tahun 2023 (tahun n)	Tahun 2024 (tahun n+1)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						SKPD											
2	1	0	2	0	1	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				7	7			6	7		
2	1	0	2	0		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				76	76			70	76		
2	1	0	2	0	0	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				1	1			1	1		
2	1	0	2	0	0	Pengadaan Mebel				1	1			1	1		
2	1	0	2	0	0	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				8	8			8	8		
2	1	0	2	0		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				3	3			3	3		
2	1	0	2	0	0	Penyediaan Jasa Surat Menyurat				4.111	4.111			3.187	3.506		
2	1	0	2	0	0	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				12	12			12	12		
2	1	0	2	0	0	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				12	12			12	12		
2	1	0	2	0		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				190	190			187	190		

KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN					PROGRAM / INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN / INDIKATOR KEGIATAN SUB KEGIATAN / INDIKATOR SUB KEGIATAN	SPM / Standar Nasional	IKK	Target Renstra SKPD					Realisasi Capaian	Proyeksi		Catatan Analisis
	(PERMENDAGRI NO 90 TAHUN 2019)								Tahun 2022 (tahun n-1)	Tahun 2023 (tahun n)	Tahun 2024 (tahun n+1)	Tahun 2025 (tahun n+2)	Tahun 2026 (tahun n+3)	Tahun 2022 (tahun n-1)	Tahun 2023 (tahun n)	Tahun 2024 (tahun n+1)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	1	0	2	0	0	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				35	35			35	35		
2	1	0	2	0	0	Pemeliharaan Mebel				33	33			30	33		
2	1	0	2	0	0	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				36	36			33	36		
2	1	0	2	0	0	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				2	2			2	2		
						Operasional UPTD				0	0			0	0		
						URUSAN PENANAMAN MODAL											
2	1	0				PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL			10	10				0			
2	1	0	2	0	1	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			5	6				5			
2	1	0	2	0	0	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan			1	1				1			

KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN					PROGRAM / INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN / INDIKATOR KEGIATAN SUB KEGIATAN / INDIKATOR SUB KEGIATAN	SPM / Standar Nasional	IKK	Target Renstra SKPD					Realisasi Capaian	Proyeksi		Catatan Analisis
	(PERMENDAGRI NO 90 TAHUN 2019)								Tahun 2022 (tahun n-1)	Tahun 2023 (tahun n)	Tahun 2024 (tahun n+1)	Tahun 2025 (tahun n+2)	Tahun 2026 (tahun n+3)	Tahun 2022 (tahun n-1)	Tahun 2023 (tahun n)	Tahun 2024 (tahun n+1)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						Penanaman Modal	Kemudahan Penanaman Modal										
2	1	0	2	0	0	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Memperoleh Insentif dan Kemudahan Berusaha di Daerah			5	6			0			
2	1	0	2	0	2	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Obyek Potensi dan Peluang Usaha			3	3			3			
2	1	0	2	0	0	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota			2	2			0			
2	1	0	2	0	0	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota			1	1			1			
2	1	0	3			PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase Peningkatan Jumlah Investor			3,55	3,61			108,08			
2	1	0	2	0	1	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Media Promosi Penanaman Modal			5	5			5			
2	1	0	2	0	0	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah yang Mengatur Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota			0	1			0			
2	1	0	2	0	0	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Promosi Potensi Investasi Tingkat Regional / Nasional			4	4			4			
2	1	0	4			PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Peningkatan			3,55	3,61			108,09			

KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (PERMENDAGRI NO 90 TAHUN 2019)	PROGRAM / INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN / INDIKATOR KEGIATAN SUB KEGIATAN / INDIKATOR SUB KEGIATAN	SPM / Standar Nasional	IKK	Target Renstra SKPD					Realisasi Capaian	Proyeksi		Catatan Analisis
					Tahun 2022 (tahun n-1)	Tahun 2023 (tahun n)	Tahun 2024 (tahun n+1)	Tahun 2025 (tahun n+2)	Tahun 2026 (tahun n+3)	Tahun 2022 (tahun n-1)	Tahun 2023 (tahun n)	Tahun 2024 (tahun n+1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB)											
2	1 8 4 2 0 1	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota			5.958	6.173				6.440			
2	1 8 4 2 0 1 1	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik			5.958	6.173				6.440			
2	1 8 4 2 0 1 2	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal			22	24				22			
2	1 8 4 2 0 1 3	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan			10	11				8			
2	1 8 4 2 0 1 4	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah			5	6				0			
2	1 8 5	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL			83	88				108,09			

KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN					PROGRAM / INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN / INDIKATOR KEGIATAN SUB KEGIATAN / INDIKATOR SUB KEGIATAN	SPM / Standar Nasional	IKK	Target Renstra SKPD					Realisasi Capaian	Proyeksi		Catatan Analisis
	(PERMENDAGRI NO 90 TAHUN 2019)								Tahun 2022 (tahun n-1)	Tahun 2023 (tahun n)	Tahun 2024 (tahun n+1)	Tahun 2025 (tahun n+2)	Tahun 2026 (tahun n+3)	Tahun 2022 (tahun n-1)	Tahun 2023 (tahun n)	Tahun 2024 (tahun n+1)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	1	0	2	0	1	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			5.958	6.173				6.440			
2	1	0	2	0	0	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal			8	8				8			
2	1	0	2	0	0	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal			238	261				220			
2	1	0	2	0	0	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal			14	16				18			
2	1	0				PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL			85	87				80			
2	1	0	2	0	1	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			100	100				80			
2	1	0	2	0	0	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik			5	5				4			

KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN					PROGRAM / INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN / INDIKATOR KEGIATAN SUB KEGIATAN / INDIKATOR SUB KEGIATAN	SPM / Standar Nasional	IKK	Target Renstra SKPD					Realisasi Capaian	Proyeksi		Catatan Analisis
	(PERMENDAGRI NO 90 TAHUN 2019)								Tahun 2022 (tahun n-1)	Tahun 2023 (tahun n)	Tahun 2024 (tahun n+1)	Tahun 2025 (tahun n+2)	Tahun 2026 (tahun n+3)	Tahun 2022 (tahun n-1)	Tahun 2023 (tahun n)	Tahun 2024 (tahun n+1)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						URUSAN PENANAMAN MODAL - REVIU											
2	1	0				PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL					10	10	10		10,00	10,00	
2	1	0	2	0	1	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota					6	7	7		10	10	
2	1	0	2	0	0	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal					1	1	1		1	1	
2	1	0	2	0	0	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal					6	7	7		6	6	
2	1	0	2	0	2	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota					4	4	4		3	4	
2	1	0	2	0	0	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota					2	2	2		2	2	
2	1	0	2	0	0	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota					1	2	2		1	2	
2	1	0				PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL					3,67	3,73	3,79		3,61	3,67	

KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN					PROGRAM / INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN / INDIKATOR KEGIATAN SUB KEGIATAN / INDIKATOR SUB KEGIATAN	SPM / Standar Nasional	IKK	Target Renstra SKPD					Realisasi Capaian	Proyeksi		Catatan Analisis
	(PERMENDAGRI NO 90 TAHUN 2019)								Tahun 2022 (tahun n-1)	Tahun 2023 (tahun n)	Tahun 2024 (tahun n+1)	Tahun 2025 (tahun n+2)	Tahun 2026 (tahun n+3)	Tahun 2022 (tahun n-1)	Tahun 2023 (tahun n)	Tahun 2024 (tahun n+1)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	1	0	2	0	1	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota					5	5	5		5	5	
2	1	0	2	0	1	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal					1	1	1		1	1	
2	1	0	2	0	2	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota					4	5	6		4	4	
2	1	0				PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL					3,67	3,73	3,79		3,61	3,67	
2	1	0	2	0	1	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota					6.400	6.639	6.890		6.173	6.400	
2	1	0	2	0	1	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik					6.400	6.639	6.890		6.173	6.400	
2	1	0	2	0	2	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal					27	29	32		24	27	

KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (PERMENDAGRI NO 90 TAHUN 2019)	PROGRAM / INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN / INDIKATOR KEGIATAN SUB KEGIATAN / INDIKATOR SUB KEGIATAN	SPM / Standar Nasional	IKK	Target Renstra SKPD					Realisasi Capaian	Proyeksi		Cata tan Analisis
					Tahun 2022 (tahun n-1)	Tahun 2023 (tahun n)	Tahun 2024 (tahun n+1)	Tahun 2025 (tahun n+2)	Tahun 2026 (tahun n+3)	Tahun 2022 (tahun n-1)	Tahun 2023 (tahun n)	Tahun 2024 (tahun n+1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2 1 8 4 2 0 1 0 3	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan					12	13	15		11	12	
2 1 8 4 2 0 1 0 4	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah Dokumen Rekomendasi Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah					6	7	7		6	6	
2 1 8 5	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase Pelaku Usaha Berizin yang Beroperasi Sesuai Izin Usahanya					90	93	95		88	90	
2 1 8 5 2 0 1	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Berizin Yang Beroperasi Sesuai Dengan Izin Yang Diterbitkan					6.400	6.639	6.890		5.958	6.400	
2 1 8 5 2 0 1 0 1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal					9	10	11		8	9	
2 1 8 5 2 0 1 0 2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal					287	316	348		261	287	
2 1 8 5 2 0 1 0 3	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan					17	19	21		16	17	

KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (PERMENDAGRI NO 90 TAHUN 2019)	PROGRAM / INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN / INDIKATOR KEGIATAN SUB KEGIATAN / INDIKATOR SUB KEGIATAN	SPM / Standar Nasional	IKK	Target Renstra SKPD					Realisasi Capaian	Proyeksi		Catatan Analisis
					Tahun 2022 (tahun n-1)	Tahun 2023 (tahun n)	Tahun 2024 (tahun n+1)	Tahun 2025 (tahun n+2)	Tahun 2026 (tahun n+3)	Tahun 2022 (tahun n-1)	Tahun 2023 (tahun n)	Tahun 2024 (tahun n+1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2 1 8 0 6		PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL					89	91	93		88	89	
2 1 8 0 6	2 0 1	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					100,00	100,00	100,00		100,00	100,00	
2 1 8 0 6	2 0 1 0 1	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik					5	5	5		5	5	
		URUSAN KETENAGAKERJAAN											
2 1 1 0 1 5	1 5	Program Peningkatan Kesempatan Kerja											
2 1 1 0 1 5	1 5 1	Penyebaran Informasi Pasar Kerja			0	0				0			
2 1 1 0 1 5	1 5 3	Pemanduan dan Bimbingan Usaha Mandiri			0	0				0			
2 1 1 0 1 6	1 6	Program Penempatan dan Pemberdayaan Transmigrasi											
1 1 0 1 6	1 6 1	Pemberangkatan Calon Transmigran dan			0	0				0			

KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (PERMENDAGRI NO 90 TAHUN 2019)	PROGRAM / INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN / INDIKATOR KEGIATAN SUB KEGIATAN / INDIKATOR SUB KEGIATAN	SPM / Standar Nasional	IKK	Target Renstra SKPD					Realisasi Capaian	Proyeksi		Catatan Analisis
					Tahun 2022 (tahun n-1)	Tahun 2023 (tahun n)	Tahun 2024 (tahun n+1)	Tahun 2025 (tahun n+2)	Tahun 2026 (tahun n+3)	Tahun 2022 (tahun n-1)	Tahun 2023 (tahun n)	Tahun 2024 (tahun n+1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Kerjasama Antar Daerah (KSAD)	diberangkatkan dengan Kabupaten Tujuan Transmigran yang disepakati											
2 1 0 1	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja											
2 1 0 1 0	Penyelenggaraan dan Pelatihan Tenaga Kerja	Jumlah Pelaksanaan Pelatihan			32	81				81			
2 1 0 1 0	Pembinaan dan Monitoring Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Produktif			80	85				0			
2 1 0 1 0	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah Pengelolaan dan Kemitraan Lembaga Pelatihan			30	40				40			
2 1 0 1	Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Persentase Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan											
2 1 0 1 0	Penyelenggaraan Sistem Pengupahan yang berkeadilan dan Penciptaan Ketenangan Kerja	Jumlah Upah Minimum Kabupaten Yang Layak			100	100				0			
2 1 0 1 0	Pembinaan dan Pengembangan Sarana Hubungan Industrial	Jumlah Sarana Hubungan Industrial Yang Melaksanakan Kegiatan Sesuai Aturan			40	40				0			
2 1 0 1 0	Optimalisasi Kinerja Lembaga Perselisihan Hubungan Industrial (PHI)	Jumlah Perselisihan Hubungan Industrial menurun			5	5				0			
2 1 0 1	Program Pembinaan Lingkungan Sosial	Persentase Pembinaan Lingkungan Sosial (DBHCHT)											

KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (PERMENDAGRI NO 90 TAHUN 2019)	PROGRAM / INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN / INDIKATOR KEGIATAN SUB KEGIATAN / INDIKATOR SUB KEGIATAN	SPM / Standar Nasional	IKK	Target Renstra SKPD					Realisasi Capaian	Proyeksi		Catatan Analisis
					Tahun 2022 (tahun n-1)	Tahun 2023 (tahun n)	Tahun 2024 (tahun n+1)	Tahun 2025 (tahun n+2)	Tahun 2026 (tahun n+3)	Tahun 2022 (tahun n-1)	Tahun 2023 (tahun n)	Tahun 2024 (tahun n+1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2 1 0 1 0 1	Pembinaan dan Pelatihan Kerja bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat melalui Pelatihan Pecah Batu	Jumlah Perorangan/Kelompok yang dilatih			1	0				0			
2 1 0 1 0 2	Bantuan Sarana Produksi Bagi Masyarakat/Kelompok Masyarakat di Bidang Pecah Batu	Jumlah Bantuan Peralatan Mesin Pemecah Batu yang diberikan/dihibahkan			1	0				0			
2 1 0 1 0 5	Pembinaan dan Pelatihan Kerja bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat melalui Pelatihan Rias Pengantin	Jumlah Perorangan/Kelompok yang dilatih			20	20				0			
2 1 0 1 0 6	Bantuan Sarana Produksi Bagi Masyarakat/Kelompok Masyarakat di Bidang Rias Pengantin	Jumlah Bantuan Peralatan Rias Pengantin yang diberikan/dihibahkan			20	20				0			
2 1 0 1 0 7	Pembinaan dan Pelatihan Kerja bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat melalui Pelatihan Keterampilan Las Listrik	Jumlah Perorangan/Kelompok yang dilatih			0	0				0			
2 1 0 1 0 8	Bantuan Sarana Produksi Bagi Masyarakat/Kelompok Masyarakat di Bidang Las Listrik	Jumlah Bantuan Peralatan Las Listrik yang diberikan/dihibahkan			0	0				0			
2 1 0 1 1 3	Pembinaan dan Pelatihan Kerja bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat melalui Pelatihan Keterampilan Bordir	Jumlah Perorangan/Kelompok yang dilatih			25	50				0			
2 1 0 1 1 7	Pembinaan dan Pelatihan Kerja bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat melalui	Jumlah Perorangan/Kelompok yang dilatih			3	0				0			

KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (PERMENDAGRI NO 90 TAHUN 2019)	PROGRAM / INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN / INDIKATOR KEGIATAN SUB KEGIATAN / INDIKATOR SUB KEGIATAN	SPM / Standar Nasional	IKK	Target Renstra SKPD					Realisasi Capaian	Proyeksi		Catatan Analisis
					Tahun 2022 (tahun n-1)	Tahun 2023 (tahun n)	Tahun 2024 (tahun n+1)	Tahun 2025 (tahun n+2)	Tahun 2026 (tahun n+3)	Tahun 2022 (tahun n-1)	Tahun 2023 (tahun n)	Tahun 2024 (tahun n+1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Pelatihan Meubelair											
2 1 0 1 2		Pembinaan dan Pelatihan Kerja bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat melalui Pelatihan Otomotif			0	1				0			
2 1 0 1 2		Bantuan Sarana Produksi Bagi Masyarakat/Kelompok Masyarakat di Bidang Otomotif			0	0				0			
2 1 0 1 2		Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasn Kesempatan Kerja bagi Pencari Kerja melalui Penyuluhan Kerja			0	0				0			
2 1 0 1 2		Pembinaan dan Pelatihan Kerja Bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat melalui Pembinaan Tenaga Kerja Mandiri Terdidik (TKMT)			40	40				0			
2 1 0 1 3		Bantuan Sarana Produksi Bagi Masyarakat/Kelompok Masyarakat di Bidang Tenaga Kerja Mandiri Terdidik (TKMT)			40	40				0			
2 1 0 1 3		Penyediaan/Peningkatan/ Pemeliharaan Sarana/Prasarana Kelembagaan Pelatihan			1	0				0			
2 1 0 2 0		Program Pelatihan Keterampilan Kerja											
2 1 0 2 0		Pelatihan Berbasis Kompetensi dan Masyarakat			25	50				0			

KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (PERMENDAGRI NO 90 TAHUN 2019)					PROGRAM / INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN / INDIKATOR KEGIATAN SUB KEGIATAN / INDIKATOR SUB KEGIATAN					SPM / Standar Nasional	IKK	Target Renstra SKPD					Realisasi Capaian	Proyeksi		Catan Analisis				
													Tahun 2022 (tahun n-1)	Tahun 2023 (tahun n)	Tahun 2024 (tahun n+1)	Tahun 2025 (tahun n+2)	Tahun 2026 (tahun n+3)	Tahun 2022 (tahun n-1)	Tahun 2023 (tahun n)	Tahun 2024 (tahun n+1)					
1	2					3					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
						<u>URUSAN KETENAGAKERJAAN - REVIU</u>																			
2	0	0				PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Persentase penggunaan Perencanaan Tenaga Kerja dalam perencanaan program / kegiatan / sub kegiatan																		
	7	2																							
2	0	0				Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Tersedianya Rencana Tenaga Kerja (RTK)																		
	7	2		2	0																				
2	0	0				Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Tersedianya Rencana Tenaga Kerja Makro																		
	7	2		2	0																				
2	0	0				Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Tersedianya Rencana Tenaga Kerja Mikro																		
	7	2		2	0																				
2	0	0				PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase tenaga kerja yg mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi																		
	7	3																							
2	0	0				Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah peserta yang dilatih dan mendapatkan sertifikat																		
	7	3		2	0																				
2	0	0				Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n																		
	7	3		2	0																				

KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (PERMENDAGRI NO 90 TAHUN 2019)	PROGRAM / INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN / INDIKATOR KEGIATAN SUB KEGIATAN / INDIKATOR SUB KEGIATAN	SPM / Standar Nasional	IKK	Target Renstra SKPD					Realisasi Capaian	Proyeksi		Catatan Analisis
					Tahun 2022 (tahun n-1)	Tahun 2023 (tahun n)	Tahun 2024 (tahun n+1)	Tahun 2025 (tahun n+2)	Tahun 2026 (tahun n+3)	Tahun 2022 (tahun n-1)	Tahun 2023 (tahun n)	Tahun 2024 (tahun n+1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2 0 7 3 2 0 0 2	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n					2	3	3		2	2	
2 0 7 3 2 0 0 3	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja					6	7	7		6	6	
2 0 7 3 2 0 0 2	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Prosentase Lembaga Pelatihan Kerja yang bersertifikasi					90,00	95,00	100,00		85,00	90,00	
2 0 7 3 2 0 0 2	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina					44	46	48		42	44	
2 0 7 3 2 0 0 3	Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja yang difasilitasi dalam proses pendaftaran					44	46	48		42	44	
2 0 7 3 2 0 0 3	Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja secara Terintegrasi	Jumlah Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi					90	95	100		85	90	
2 0 7 3 2 0 0 4	Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	Prosentase Peningkatan Produktivitas Perusahaan Kecil					4,00	4,50	5,00		3,50	4,00	
2 0 7 3 2 0 0 4	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Jumlah Perusahaan Kecil yang mendapat Konsultasi peningkatan					84	86	108		82	84	

KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (PERMENDAGRI NO 90 TAHUN 2019)	PROGRAM / INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN / INDIKATOR KEGIATAN SUB KEGIATAN / INDIKATOR SUB KEGIATAN	SPM / Standar Nasional	IKK	Target Renstra SKPD					Realisasi Capaian	Proyeksi		Catan Analisis
					Tahun 2022 (tahun n-1)	Tahun 2023 (tahun n)	Tahun 2024 (tahun n+1)	Tahun 2025 (tahun n+2)	Tahun 2026 (tahun n+3)	Tahun 2022 (tahun n-1)	Tahun 2023 (tahun n)	Tahun 2024 (tahun n+1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Produktivitas											
2	0	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					2,50	2,50	2,78		2,50	2,50	
2	0	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja					5	5	5		5	5	
2	0	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA					76,11	76,71	77,31		75,51	76,11	
2	0	Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota					41,86	42,46	43,06		41,26	41,86	
2	0	Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja					20	20	20		20	20	
2	0	Pelayanan antar Kerja					60	65	70		55	60	
2	0	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja					48	53	59		44	48	
2	0	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas					12	13	15		11	12	

KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (PERMENDAGRI NO 90 TAHUN 2019)	PROGRAM / INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN / INDIKATOR KEGIATAN SUB KEGIATAN / INDIKATOR SUB KEGIATAN	SPM / Standar Nasional	IKK	Target Renstra SKPD					Realisasi Capaian	Proyeksi		Catatan Analisis
					Tahun 2022 (tahun n-1)	Tahun 2023 (tahun n)	Tahun 2024 (tahun n+1)	Tahun 2025 (tahun n+2)	Tahun 2026 (tahun n+3)	Tahun 2022 (tahun n-1)	Tahun 2023 (tahun n)	Tahun 2024 (tahun n+1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Ketenagakerjaan	yang Mendapatkan Fasilitas Layanan ULD											
2 0 0 2 0 0 7 4 2 1 5	Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja					908	998	1098		825	908	
2 0 0 2 0 7 4 2 2	Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS)					1,80	2,40	3,00		1,20	1,80	
2 0 0 2 0 0 7 4 2 2 1	Penyediaan Sumber Daya Perizinan LPTKS secara Terintegrasi	Jumlah Perizinan LPTKS yang Terintegrasi					7	8	9		6	7	
2 0 0 2 0 0 7 4 2 2 2	Pengawasan dan Pengendalian LPTKS	Jumlah LPTKS yang Dilakukan Pengawasan dan Pengendalian Sesuai dengan Aturan yang Berlaku					7	8	9		6	7	
2 0 0 2 0 7 4 2 3	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Prosentase kualitas Pengelolaan Informasi Pasar Kerja					81,20	81,80	82,40		80,60	81,20	
2 0 0 2 0 0 7 4 2 3 1	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online					4	4	4		4	4	
2 0 0 2 0 0 7 4 2 3 2	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)					868	912	957		827	868	
2 0 0 2 0 0	Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan					61	67	73		55	61	

KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (PERMENDAGRI NO 90 TAHUN 2019)	PROGRAM / INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN / INDIKATOR KEGIATAN SUB KEGIATAN / INDIKATOR SUB KEGIATAN	SPM / Standar Nasional	IKK	Target Renstra SKPD					Realisasi Capaian	Proyeksi		Catatan Analisis
					Tahun 2022 (tahun n-1)	Tahun 2023 (tahun n)	Tahun 2024 (tahun n+1)	Tahun 2025 (tahun n+2)	Tahun 2026 (tahun n+3)	Tahun 2022 (tahun n-1)	Tahun 2023 (tahun n)	Tahun 2024 (tahun n+1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	00203	Pekerjaan Melalui Job Fair /Bursa Kerja											
2	00204	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota					90,00	95,00	100,00		85,00	90,00	
2	002041	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)					69	73	77		66	69	
2	002042	Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran					20	20	20		20	20	
2	002043	Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan					24	27	29		22	24	
2	00205	Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota					85,00	87,50	90,00		82,50	85,00	
2	002051	Koordinasi dan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota					5	5	5		5	5	
2	0075	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL					100,00	100,00	100,00		100,00	100,00	

KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (PERMENDAGRI NO 90 TAHUN 2019)	PROGRAM / INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN / INDIKATOR KEGIATAN SUB KEGIATAN / INDIKATOR SUB KEGIATAN	SPM / Standar Nasional	IKK	Target Renstra SKPD					Realisasi Capaian	Proyeksi		Catatan Analisis
					Tahun 2022 (tahun n-1)	Tahun 2023 (tahun n)	Tahun 2024 (tahun n+1)	Tahun 2025 (tahun n+2)	Tahun 2026 (tahun n+3)	Tahun 2022 (tahun n-1)	Tahun 2023 (tahun n)	Tahun 2024 (tahun n+1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2 0 7 5 2 0 1	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah peserta sosialisasi pembuatan PP dan PKB					29	32	34		27	29	
2 0 7 5 2 0 1 0 1	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online					24	27	29		22	24	
2 0 7 5 2 0 1 0 2	Pendaftaran Perjanjian Kerjasama bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama					5	5	5		5	5	
2 0 7 5 2 0 1 0 3	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan					5.224	5.486	5.760		4.976	5.224	
2 0 7 5 2 0 2	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Penyelesaian Perselisihan Perusahaan					88,20	92,61	97,24		84,00	88,20	

KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (PERMENDAGRI NO 90 TAHUN 2019)	PROGRAM / INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN / INDIKATOR KEGIATAN SUB KEGIATAN / INDIKATOR SUB KEGIATAN	SPM / Standar Nasional	IKK	Target Renstra SKPD					Realisasi Capaian	Proyeksi		Catatan Analisis
					Tahun 2022 (tahun n-1)	Tahun 2023 (tahun n)	Tahun 2024 (tahun n+1)	Tahun 2025 (tahun n+2)	Tahun 2026 (tahun n+3)	Tahun 2022 (tahun n-1)	Tahun 2023 (tahun n)	Tahun 2024 (tahun n+1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2 0 7 5 2 0 0 1	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perselisihan yang Dicegah					5	5	5		5	5	
2 0 7 5 2 0 0 2	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perkara Perselisihan yang terselesaikan					5	5	5		5	5	
2 0 7 5 2 0 0 3	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi					23	24	26		22	23	
2 0 7 5 2 0 0 4	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina					23	24	26		22	23	
2 0 7 5 2 0 0 5	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja					3.450	3.650	3.850		32	3.450	

KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (PERMENDAGRI NO 90 TAHUN 2019)	PROGRAM / INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN / INDIKATOR KEGIATAN SUB KEGIATAN / INDIKATOR SUB KEGIATAN	SPM / Standar Nasional	IKK	Target Renstra SKPD					Realisasi Capaian	Proyeksi		Catatan Analisis
					Tahun 2022 (tahun n-1)	Tahun 2023 (tahun n)	Tahun 2024 (tahun n+1)	Tahun 2025 (tahun n+2)	Tahun 2026 (tahun n+3)	Tahun 2022 (tahun n-1)	Tahun 2023 (tahun n)	Tahun 2024 (tahun n+1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	3	0											
2	3						85,00	87,50	90,00		82,50	85,00	
3	3	0											
2	3	2	0				3	3	3		3	3	
3	3	0											
2	3	2	0				6	8	8		6	6	
3	3	0											
2	3	2	0				3	4	4		2	3	
3	3	0											
2	3	2	0				3	4	4		3	3	

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Kedudukan, Susunan dan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja, maka tugas pokok DPMPTSP&NAKER adalah **Membantu Bupati melaksanakan penyusunan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan daerah di Bidang Penanaman Modal dan Bidang Tenaga Kerja**. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas DPMPTSP & NAKER mempunyai fungsi :

- 1) Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan penyusunan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan daerah di Bidang Penanaman Modal dan Bidang Tenaga Kerja.
- 2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1), Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan di bidang penanaman modal dan bidang tenaga kerja;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang penanaman modal dan bidang tenaga kerja;
 - c. pelaksanaan perencanaan dan pengembangan iklim, promosi dan publikasi, pengendalian dan penanganan pengaduan, pelayanan perizinan dan noperizinan, pengolahan data dan sistem informasi di bidang penanaman modal;
 - d. pelaksanaan pengolahan data dan sistem informasi, penempatan tenaga kerja dan transmigrasi, pelatihan dan produktifitas kerja, serta hubungan industrial dan jaminan sosial di bidang tenaga kerja;
 - e. pelaksanaan kajian teknis, monitoring dan evaluasi, pelaporan dibidang penanaman modal dan tenaga kerja;
 - f. pelaksanaan administrasi ketatausahaan Dinas; dan
 - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Dalam melaksanakan Tugas dan Fungsi Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan, serta Ketenagakerjaan timbul permasalahan yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan. Permasalahan tersebut antara lain:

- a. Adanya kesenjangan pembangunan sarana prasarana fisik antara daratan dengan kepulauan).
- b. Minimnya ketersediaan sarana telekomunikasi / informatika untuk daerah daratan yang jauh dari ibu kota kecamatan dan kecamatan kepulauan..
- c. Rendahnya daya tarik dan daya saing wilayah.
- d. Rendahnya konektivitas antar sektor sumber daya.
- e. Rendahnya daya saing dan daya tarik sektor UMKM unggulan.
- f. Masih rendahnya pelaksanaan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) secara online oleh pelaku usaha.
- g. Kurangnya dukungan dari masyarakat sekitar dan stakeholder lainnya untuk turut aktif mensukseskan pelaksanaan penanaman modal.
- h. Kurangnya sarana promosi publikasi data profil potensi/peleuang investasi yang seharusnya lebih masif dilakukan.
- i. Legalitas lahan tanah tempat usaha yang merupakan bagian penting dari peluang investasi belum clear and clean.
- j. Belum tersusunnya road map potensi investasi.
- k. Belum tersusunnya prospektus potensi investasi berdasarkan skala prioritas yang akan dikembangkan.
- l. Apriori masyarakat terhadap proses penerbitan perizinan.
- m. Tidak terpenuhinya kuantitas SDM untuk kebutuhan ideal dalam memberikan pelayanan perizinan.
- o. Potensi perizinan di kecamatan kepulauan belum tergarap secara optimal karena terkendala biaya akomodasi dan transportasi yang dikeluarkan oleh masyarakat kepulauan begitu besar dalam memenuhi kebutuhannya untuk mendapatkan layanan perizinan.
- p. Adanya ketidak patuhan penggunaan izin oleh pelaku usaha.
- q. Kurangnya kesadaran hukum bagi pelaku usaha untuk melegalkan usahanya.

- r. Masyarakat kurang responsif terhadap penyediaan pelayanan perizinan secara online.
- s. Kabupaten kurang dilibatkan dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh BPKM.
- o. Kurangnya daya dukung anggaran terhadap MPP dalam memenuhi kebutuhan kelangsungan pelayanan di Mall Pelayanan Perizinan.

Untuk mengatasi hambatan-hambatan yang timbul ditetapkan isu-isu penting diantaranya:

- a. Melakukan pemetaan dan penelitian terhadap potensi/peluang/proyek investasi dan potensi perizinan.
- b. Meningkatkan kegiatan promosi potensi/peluang/proyek investasi dan penciptaan kemudahan berinvestasi.
- c. Penyederhanaan syarat administrasi permohonan perizinan.
- d. Penyederhanaan input data pada permohonan perizinan online
- e. Peningkatan kuantitas jam pelayanan dan tempat pelaksanaan operasional mobil pelayanan keliling untuk menjemput bola permohonan perizinan.
- f. Tersedianya tenaga teknis dari OPD teknis yang ditempatkan di front office perizinan.
- g. Sinergitas program dan kegiatan antar OPD untuk mewujudkan peningkatan realisasi penanaman modal.
- h. Menciptakan strategi publikasi yang pesannya sampai ke semua lapisan masyarakat.
- i. Menyediakan road map dan prospektus potensi investasi.
- j. Sosialisasi kepada masyarakat tentang manfaat penanaman modal.
- k. Sosialisasi dan pendampingan kepada pelaku usaha tentang pelaksanaan Laporan Pelaksanaan Penanaman Modal (LKPM) secara online.
- l. Sosialisasi dan pendampingan kepada masyarakat dalam melegalkan usahanya.
- m. Sosialisasi, melaksanakan penerimaan permohonan dan penerbitan perizinan secara manual di kecamatan kepulauan.
- n. Pendampingan kepada masyarakat kepulauan dalam proses melegalkan usahanya melalui Online Single Submission (OSS) RBA.

- o. Pemantauan dan pengawasan operasional pelaku usaha yang sudah memiliki izin.
- p. Pembinaan peningkatan mutu manajemen kepada pelaku usaha.
- q. Komunikasi yang intensif dengan Badan Pertanahan tentang prioritas penyelesaian pertimbangan teknis dan izin lokasi lahan peluang investasi.
- r. Komunikasi yang intensif dengan OPD terkait tentang pengalokasian anggaran prioritas program yang terintegrasi dalam mendukung tercapainya potensi/peluang/proyek investasi.
- s. Komunikasi yang intensif dengan OPD terkait tentang pengalokasian anggaran prioritas program dalam mendukung tercapainya penanaman modal UMKM yang menghasilkan produk unggulan yang kompetitif.
- t. Pengenaan kebijakan kepada pelaku usaha untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat yang terdampak pelaksanaan penanaman modal.
- u. Pendampingan konektivitas antara pelaku usaha UMKM dengan perusahaan menengah/besar skala regional dan nasional dalam pelaksanaan pengembangan produk, aneka produk dan pangsa pasar.
- v. Pendampingan konektivitas antara Sekolah Menengah Kejuruan dengan perusahaan menengah/besar skala regional dan nasional dalam pelaksanaan pemagangan peserta didik dan perolehan bantuan sarana prasarana praktek pembelajaran.
- w. Penyusunan PERDA tentang pemberian insentif kepada pelaku usaha.
- x. Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SPP) dan Standar Pelayanan Publik (SPP) pelaksanaan pemberian insentif penanaman modal.
- y. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kepada pelaku usaha yang menerima insentif penanaman modal.
- z. Pengenaan sanksi administratif bagi pelaku usaha yang tidak melaksanakan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) secara online.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan awal RKPD tahun 2024 dibuat berdasarkan hasil evaluasi RPJMD Tahun 2021-2026 dan RPJMD Provinsi Jawa Timur tahun 2019-2024. Pada rancangan awal tersebut dapat dilihat target-target yang ingin dicapai pada Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun

2024 dengan mengacu pada capaian kinerja tahun 2022 yang pencapaiannya melalui program dan kegiatan dengan melihat hasil evaluasi tahun 2022, permasalahan dan analisis kebutuhan maka disusunlah program dan kegiatan tahun 2024 yang lebih realistis untuk mencapai target - target tersebut. Review terhadap rancangan awal RKPD tahun 2024 dan rumusan kebutuhan program dan kegiatan tahun 2024 dapat dilihat sebagaimana tabel T-C. 31 berikut :

Tabel T-C. 31
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024
Kabupaten Sumenep

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				38.344.033.531	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				38.344.033.531	
	BELANJA RUTIN				15.467.317.388					15.467.317.388	
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor	20,00	15.467.317.388	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor	20,00	15.467.317.388	
A.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah dokumen perencanaan, penanggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun	12	152.479.317	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah dokumen perencanaan, penanggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun	12	152.479.317	
A.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Sumenep	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3	26.620.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Sumenep	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3	1.680.000	
A.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Sumenep	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4	13.310.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Sumenep	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4	545.000	
A.1.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Sumenep	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	4	6.069.317	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Sumenep	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	4	796.500	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			
A.1.4	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Sumenep	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2	106.480.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Sumenep	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0	0	
A.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah	12	12.329.206.411	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah	12	4.177.183.797	
A.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Sumenep	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	71	12.315.896.411	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Sumenep	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	71	4.177.183.797	
A.2.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan ulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Kab. Sumenep	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	12	13.310.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan ulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Kab. Sumenep	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	0	0	
A.3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah Jenis layanan kepegawaian yang disediakan	5	258.793.890	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah Jenis layanan kepegawaian yang disediakan	0	0	
A.3.1	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Kab. Sumenep	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	1	9.317.000	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Kab. Sumenep	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	0	0	
A.3.2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Sumenep	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	71	188.208.298	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Sumenep	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	0	0	
A.3.3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kab. Sumenep	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan	3	19.965.000	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kab. Sumenep	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan	0	0	

No	Rancangan Awal RKP					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Administrasi Kepegawaian					Administrasi Kepegawaian			
A.3.4	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Sumenep	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	6	27.993.592	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Sumenep	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	0	0	
A.3.5	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Sumenep	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	32	13.310.000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Sumenep	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	0	0	
A.4	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	50	858.967.756	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	50	124.583.600	
A.4.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Sumenep	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	26	23.824.957	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Sumenep	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	26	3.179.600	
A.4.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Sumenep	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	116.532.523	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Sumenep	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	3.136.500	
A.4.3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Sumenep	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12	243.093.549	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Sumenep	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12	40.209.800	
			jumlah makan dan minum yang disediakan	3				jumlah makan dan minum yang disediakan	3		
A.4.4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Sumenep	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	5	25.550.203	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Sumenep	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	5	6.449.200	

No	Rancangan Awal RKP					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A.4.5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Sumenep	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	365	133.447.923	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Sumenep	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	365	5.280.000	
A.4.6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Sumenep	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	131	201.049.280	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Sumenep	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	131	52.172.000	
A.4.7	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Sumenep	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	4	115.469.321	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Sumenep	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	4	14.156.500	
A.5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah Barang Milik Daerah yang Diadakan	76	574.584.450	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah Barang Milik Daerah yang Diadakan	10	69.341.145	
A.5.1	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Sumenep	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1	275.000.000	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Sumenep	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	0	0	
A.5.2	Pengadaan Mebel	Kab. Sumenep	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	67	183.779.806	Pengadaan Mebel	Kab. Sumenep	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0	0	
A.5.3	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Sumenep	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	8	115.804.644	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Sumenep	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10	69.341.145	
A.6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah layanan jasa yang disediakan	3	759.266.628	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah layanan jasa yang disediakan	3	759.266.628	
A.6.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Sumenep	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.111	5.230.145	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Sumenep	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.111	1.814.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A.6.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Sumenep	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	385.415.958	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Sumenep	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	385.415.958	
A.6.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Sumenep	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	368.620.525	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Sumenep	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	368.620.525	
A.7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah jenis barang yang dipelihara	4	534.018.936	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah jenis barang yang dipelihara	4	534.018.936	
A.7.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Sumenep	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	37	158.556.174	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Sumenep	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	37	158.556.174	
A.7.2	Pemeliharaan Mebel	Kab. Sumenep	Jumlah Mebel yang Dipelihara	87	36.583.034	Pemeliharaan Mebel	Kab. Sumenep	Jumlah Mebel yang Dipelihara	87	36.583.034	
A.7.3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Sumenep	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	64	42.778.872	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Sumenep	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	64	42.778.872	
A.7.4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Sumenep	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2	296.100.856	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Sumenep	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2	296.100.856	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL				2.308.878.036	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL				2.308.878.036	
	URUSAN PENANAMAN MODAL - REVIU				2.308.878.036	URUSAN PENANAMAN MODAL - REVIU				2.308.878.036	
I	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL		Persentase Pelaku Usaha yang mendapatkan Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal	10,00	345.489.382	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL		Persentase Pelaku Usaha yang mendapatkan Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal	10,00	345.489.382	
I.1	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Pelaku Usaha yang mendapatkan Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal	7	133.100.000	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Pelaku Usaha yang mendapatkan Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal	7	133.100.000	
I.1.1	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Kab. Sumenep	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	1	66.550.000	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Kab. Sumenep	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	1	66.550.000	
I.1.2	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Kab. Sumenep	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Memperoleh Insentif dan Kemudahan Berusaha di Daerah	6	66.550.000	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Kab. Sumenep	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Memperoleh Insentif dan Kemudahan Berusaha di Daerah	6	66.550.000	
I.2	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota		Jumlah Obyek Potensi dan Peluang Usaha	3	212.389.382	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota		Jumlah Obyek Potensi dan Peluang Usaha	3	212.389.382	
I.2.1	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Sumenep	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah	2	66.550.000	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Sumenep	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah	2	66.550.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Kabupaten/Kota					Kabupaten/Kota			
I.2.2	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Kab. Sumenep	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang	1	145.839.382	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Kab. Sumenep	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang	1	145.839.382	
II	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL		Persentase Peningkatan Jumlah Investor	3,67	240.482.817	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL		Persentase Peningkatan Jumlah Investor	3,67	240.482.817	
II.1	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Media Promosi Penanaman Modal	6	240.482.817	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Media Promosi Penanaman Modal	6	240.482.817	
II.1.1	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Kab. Sumenep	Jumlah Peraturan Daerah yang Mengatur Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	1	74.115.670	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Kab. Sumenep	Jumlah Peraturan Daerah yang Mengatur Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	1	74.115.670	
II.1.2	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Regional / Nasional	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	5	166.367.147	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Regional / Nasional	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	5	166.367.147	
III	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL		Persentase Peningkatan Penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB)	3,67	1.312.255.509	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL		Persentase Peningkatan Penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB)	3,67	1.312.255.509	
III.1	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota		Jumlah Nomor Induk Berusaha (NIB) yang diterbitkan	6.400	1.312.255.509	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota		Jumlah Nomor Induk Berusaha (NIB) yang diterbitkan	6.400	1.312.255.509	

No	Rancangan Awal RKP					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
III.1.1	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Kab. Sumenep	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	6.400	1.210.000.000	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Kab. Sumenep	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	6.400	1.210.000.000	
III.1.2	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Kab. Sumenep	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal	27	60.534.848	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Kab. Sumenep	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal	27	60.534.848	
III.1.3	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Kab. Sumenep	Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu	12	8.445.661	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Kab. Sumenep	Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu	12	8.445.661	
III.1.4	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Kab. Sumenep	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	6	33.275.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Kab. Sumenep	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	6	33.275.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
IV	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL		Persentase Pelaku Usaha Berizin yang Beroperasi Sesuai Izin Usahanya	6.400	378.524.021	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL		Persentase Pelaku Usaha Berizin yang Beroperasi Sesuai Izin Usahanya	6.400	378.524.021	
IV.1	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Pelaku Usaha Berizin Yang Beroperasi Sesuai Dengan Izin Yang Diterbitkan	6.400	378.524.021	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Pelaku Usaha Berizin Yang Beroperasi Sesuai Dengan Izin Yang Diterbitkan	6.400	378.524.021	
IV.1.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Kab. Sumenep	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	9	74.115.670	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Kab. Sumenep	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	9	74.115.670	
IV.1.2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Kab. Sumenep	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	287	166.367.147	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Kab. Sumenep	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	287	166.367.147	
IV.1.3	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Kab. Sumenep	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan	17	138.041.204	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Kab. Sumenep	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan	17	138.041.204	
V	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL		Persentase Peningkatan Pemanfaatan Sistem Informasi Penanaman Modal	90,00	32.126.307	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL		Persentase Peningkatan Pemanfaatan Sistem Informasi Penanaman Modal	90,00	32.126.307	

No	Rancangan Awal RKP					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
V.1	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Pengelolaan Data Realisasi Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan Tepat Waktu	100,00	32.126.307	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Pengelolaan Data Realisasi Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan Tepat Waktu	100,00	32.126.307	
V.1.1	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Kab. Sumenep	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	5	32.126.307	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Kab. Sumenep	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	5	32.126.307	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENAGAKERJAAN				20.555.738.107	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENAGAKERJAAN				20.555.738.107	
	URUSAN KETENAGAKERJAAN - REVIU				20.555.738.107	URUSAN KETENAGAKERJAAN - REVIU				20.555.738.107	
I	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA		Persentase penggunaan Perencanaan Tenaga Kerja dalam perencanaan program / kegiatan / sub kegiatan	85,00	199.650.000	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA		Persentase penggunaan Perencanaan Tenaga Kerja dalam perencanaan program / kegiatan / sub kegiatan	85,00	199.650.000	
I.1	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)		Tersedianya Rencana Tenaga Kerja (RTK)	2	199.650.000	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)		Tersedianya Rencana Tenaga Kerja (RTK)	2	199.650.000	
I.1.1	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Kab. Sumenep	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	1	133.100.000	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Kab. Sumenep	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	1	133.100.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I.1.2	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Kab. Sumenep	Jumlah Perusahaan yang Menyusun RTK Mikro	1	66.550.000	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Kab. Sumenep	Jumlah Perusahaan yang Menyusun RTK Mikro	1	66.550.000	
II	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA		Persentase tenaga kerja yg mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	4,71	1.378.482.902	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA		Persentase tenaga kerja yg mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	4,71	1.378.482.902	
II.1	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi		Jumlah peserta yang dilatih dan mendapatkan sertifikat	89	1.085.590.603	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi		Jumlah peserta yang dilatih dan mendapatkan sertifikat	89	1.085.590.603	
II.1.1	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Kab. Sumenep	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n-1	93	925.870.603	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Kab. Sumenep	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n-1	93	925.870.603	
II.1.2	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Kab. Sumenep	Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n	2	26.620.000	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Kab. Sumenep	Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n	2	26.620.000	
II.1.3	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	Kab. Sumenep	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja	6	133.100.000	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	Kab. Sumenep	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja	6	133.100.000	
II.2	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta		Prosentase Lembaga Pelatihan Kerja yang bersertifikasi	90,00	79.895.759	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta		Prosentase Lembaga Pelatihan Kerja yang bersertifikasi	90,00	79.895.759	
II.2.1	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Kab. Sumenep	Jumlah pembinaan lembaga pelatihan kerja swasta	44	79.895.759	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Kab. Sumenep	Jumlah pembinaan lembaga pelatihan kerja swasta	44	79.895.759	

No	Rancangan Awal RKP					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
II.3	Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja		Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja yang difasilitasi dalam proses pendaftaran	44	66.550.000	Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja		Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja yang difasilitasi dalam proses pendaftaran	44	66.550.000	
II.3.1	Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja secara Terintegrasi	Kab. Sumenep	Jumlah Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi	90	66.550.000	Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja secara Terintegrasi	Kab. Sumenep	Jumlah Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi	90	66.550.000	
II.4	Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil		Prosentase Peningkatan Produktivitas Perusahaan Kecil	4,00	79.896.540	Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil		Prosentase Peningkatan Produktivitas Perusahaan Kecil	4,00	79.896.540	
II.4.1	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Kab. Sumenep	Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultasi Peningkatan Produktivitas	84	79.896.540	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Kab. Sumenep	Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultasi Peningkatan Produktivitas	84	79.896.540	
II.5	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Persentase peningkatan skor Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten	2,50	66.550.000	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Persentase peningkatan skor Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten	2,50	66.550.000	
II.5.1	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Kab. Sumenep	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah	5	66.550.000	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Kab. Sumenep	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah	5	66.550.000	
III	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA		Persentase pencari kerja yang ditempatkan	76,11	18.327.999.007	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA		Persentase pencari kerja yang ditempatkan	76,11	18.327.999.007	
III.1	Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota		Persentase partisipasi angkatan kerja	41,86	17.766.068.210	Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota		Persentase partisipasi angkatan kerja	41,86	17.766.068.210	
III.1.1	Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja	Kab. Sumenep	Jumlah SDM Pelayanan antar Kerja yang	20	14.368.211.550	Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja	Kab. Sumenep	Jumlah SDM Pelayanan antar Kerja yang	20	14.368.211.550	

No	Rancangan Awal RKP					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Mendapatkan Pelatihan Melalui Bimtek dan lain-lain untuk Peningkatan Kompetensi					Mendapatkan Pelatihan Melalui Bimtek dan lain-lain untuk Peningkatan Kompetensi			
III.1.2	Pelayanan antar Kerja	Kab. Sumenep	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL	60	13.310.000	Pelayanan antar Kerja	Kab. Sumenep	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL	60	13.310.000	
III.1.3	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Kab. Sumenep	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	48	26.620.000	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Kab. Sumenep	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	48	26.620.000	
III.1.4	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Kab. Sumenep	Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitas Layanan ULD	12	26.620.000	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Kab. Sumenep	Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitas Layanan ULD	12	26.620.000	
III.1.5	Perluasan Kesempatan Kerja	Kab. Sumenep	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	908	3.331.306.660	Perluasan Kesempatan Kerja	Kab. Sumenep	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	908	3.331.306.660	
III.2	Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Peningkatan Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS)	1,80	79.860.000	Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Peningkatan Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS)	1,80	79.860.000	
III.2.1	Penyediaan Sumber Daya Perizinan LPTKS secara Terintegrasi	Kab. Sumenep	Jumlah Perizinan LPTKS yang Terintegrasi	7,00	66.550.000	Penyediaan Sumber Daya Perizinan LPTKS secara Terintegrasi	Kab. Sumenep	Jumlah Perizinan LPTKS yang Terintegrasi	7,00	66.550.000	
III.2.2	Pengawasan dan Pengendalian LPTKS	Kab. Sumenep	Jumlah LPTKS yang Dilakukan Pengawasan dan Pengendalian Sesuai dengan Aturan yang Berlaku	7	13.310.000	Pengawasan dan Pengendalian LPTKS	Kab. Sumenep	Jumlah LPTKS yang Dilakukan Pengawasan dan Pengendalian Sesuai dengan Aturan yang Berlaku	7	13.310.000	

No	Rancangan Awal RKP					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
III.3	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja		Prosentase kualitas Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	81,20	334.413.646	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja		Prosentase kualitas Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	81,20	334.413.646	
III.3.1	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Kab. Sumenep	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	4	53.240.000	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Kab. Sumenep	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	4	53.240.000	
III.3.2	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Kab. Sumenep	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)	868	114.798.646	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Kab. Sumenep	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)	868	114.798.646	
III.3.3	Job Fair/Bursa Kerja	Kab. Sumenep	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair /Bursa Kerja	61	166.375.000	Job Fair/Bursa Kerja	Kab. Sumenep	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair /Bursa Kerja	61	166.375.000	
III.4	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota		Persentase PMI yang dilayani	90,00	147.657.151	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota		Persentase PMI yang dilayani	90,00	147.657.151	
III.4.1	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Kab. Sumenep	Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	69	54.487.151	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Kab. Sumenep	Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	69	54.487.151	
III.4.2	Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran	Kab. Sumenep	Jumlah CPMI yang Terlayani sesuai Prosedur dalam LTSA dan PMI Bermasalah yang Ditangani	20	66.550.000	Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran	Kab. Sumenep	Jumlah CPMI yang Terlayani sesuai Prosedur dalam LTSA dan PMI Bermasalah yang Ditangani	20	66.550.000	
III.4.3	Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	Kab. Sumenep	Jumlah PMI Purna yang Diberdayakan	24	26.620.000	Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	Kab. Sumenep	Jumlah PMI Purna yang Diberdayakan	24	26.620.000	

No	Rancangan Awal RKP					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
III.5	Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Persentase penggunaan IMTA sesuai peruntukannya	85,00	12.100.000	Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Persentase penggunaan IMTA sesuai peruntukannya	85,00	12.100.000	
III.5.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Sumenep	Jumlah Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja	5	12.100.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Sumenep	Jumlah Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja	5	12.100.000	
IV	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL		Presentase Pengesahan Peraturan Perusahaan	100,00	475.396.769	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL		Presentase Pengesahan Peraturan Perusahaan	100,00	475.396.769	
IV.1	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah peserta sosialisasi pembuatan PP dan PKB	29	174.139.419	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah peserta sosialisasi pembuatan PP dan PKB	29	174.139.419	
IV.1.1	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Kab. Sumenep	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	24	73.985.511	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Kab. Sumenep	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	24	73.985.511	
IV.1.2	Pendaftaran Perjanjian Kerjasama bagi Perusahaan	Kab. Sumenep	Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama	5	26.620.000	Pendaftaran Perjanjian Kerjasama bagi Perusahaan	Kab. Sumenep	Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama	5	26.620.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
IV.1.3	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Kab. Sumenep	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	5.224	73.533.908	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Kab. Sumenep	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	5.224	73.533.908	
IV.2	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota		Presentase Penyelesaian Perselisihan Perusahaan	88,20	301.257.350	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota		Presentase Penyelesaian Perselisihan Perusahaan	88,20	301.257.350	
IV.2.1	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Sumenep	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	5	74.025.001	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Sumenep	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	5	74.025.001	
IV.2.2	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Sumenep	Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan	5	26.620.000	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Sumenep	Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan	5	26.620.000	
IV.2.3	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Kab. Sumenep	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi	23	26.620.000	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Kab. Sumenep	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi	23	26.620.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
IV.2.4	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Sumenep	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	23	147.372.349	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Sumenep	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	23	147.372.349	
IV.2.5	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Kab. Sumenep	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	3.450	26.620.000	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Kab. Sumenep	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	3.450	26.620.000	
V	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI		Persentase Transmigran yang Berhasil Meningkatkan Taraf Ekonomi dan Sosialnya	85,00	174.209.429	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI		Persentase Transmigran yang Berhasil Meningkatkan Taraf Ekonomi dan Sosialnya	85,00	174.209.429	
V.1	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah kunjungan kerjasama antar daerah penempatan transmigrasi	3	174.209.429	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah kunjungan kerjasama antar daerah penempatan transmigrasi	3	174.209.429	
V.1.1	Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Sumenep	Jumlah Transmigran yang Dipindahkan dan Ditempatkan	6	81.039.429	Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Sumenep	Jumlah Transmigran yang Dipindahkan dan Ditempatkan	6	81.039.429	
V.1.2	Penyuluhan Transmigrasi	Kab. Sumenep	Jumlah Calon Transmigran yang Mendapatkan Penyuluhan	3	26.620.000	Penyuluhan Transmigrasi	Kab. Sumenep	Jumlah Calon Transmigran yang Mendapatkan Penyuluhan	3	26.620.000	
V.1.3	Pelatihan Transmigrasi	Kab. Sumenep	Jumlah Calon Transmigran dan/atau Transmigran yang Mendapatkan Pelatihan	3	66.550.000	Pelatihan Transmigrasi	Kab. Sumenep	Jumlah Calon Transmigran dan/atau Transmigran yang Mendapatkan Pelatihan	3	66.550.000	
JUMLAH PAGU INDIKATIF					38.344.033.531	JUMLAH KEBUTUHAN DANA					38.344.033.531

2.5. Penelahaan Usulan Program Kegiatan Masyarakat

Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja Kabupaten Sumenep mempunyai tugas dan fungsi urusan penanaman modal dan ketenagakerjaan. Urusan Penanaman dan Ketenagakerjaan dalam katagori Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar, sehingga tidak ada usulan program dan kegiatan dari masyarakat. Program dan Kegiatan DPMPTSP & NAKER bersifat top down dan Bottom Up, sebagaimana pada tabel T-C. 32 berikut ini.

.Tabel T-C. 32

Usulan Program Dan Kegiatan Dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024 Kabupaten Sumenep

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
	BELANJA RUTIN				
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor	20,00	
			Persentase pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran	20,00	
A.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah dokumen perencanaan, penanggaran dan evaulasi kinerja perangkat daerah yang disusun	12	
A.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Sumenep	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3	
A.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Sumenep	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4	
A.1.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Sumenep	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4	
A.1.4	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Sumenep	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2	
A.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	12	
A.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Sumenep	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	71	

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
A.2.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan ulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Kab. Sumenep	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12	
A.3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah Jenis layanan kepegawaian yang disediakan	5	
A.3.1	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Kab. Sumenep	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	1	
A.3.2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Sumenep	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	71	
A.3.3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kab. Sumenep	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	3	
A.3.4	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Sumenep	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	6	
A.3.5	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Sumenep	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	67	
A.4	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	50	
A.4.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Sumenep	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	26	
A.4.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Sumenep	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	
A.4.3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Sumenep	jumlah jenis ATK yang disediakan	12	
			Jumlah item makanan dan minuman yang disediakan	3	
A.4.4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Sumenep	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3.328	
A.4.5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Sumenep	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	365	
A.4.6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Sumenep	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	131	
A.4.7	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Sumenep	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	4	
A.5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah Barang Milik Daerah yang Diadakan	76	
A.5.1	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Sumenep	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1	
A.5.2	Pengadaan Mebel	Kab. Sumenep	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	67	

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
A.5.3	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Sumenep	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	8	
A.6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah layanan jasa yang disediakan	3	
A.6.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Sumenep	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.111	
A.6.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Sumenep	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	
A.6.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Sumenep	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	
A.7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah jenis barang yang dipelihara	4	
A.7.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Sumenep	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	37	
A.7.2	Pemeliharaan Mebel	Kab. Sumenep	Jumlah Mebel yang Dipelihara	87	
A.7.3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Sumenep	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	64	
A.7.4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Sumenep	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara	2	
A.8	Operasional UPTD	Kab. Sumenep	Jumlah Sarana dan Prasarana Operasioanal yang ada di UPTD	5	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL				
	URUSAN PENANAMAN MODAL - REVIU				
I	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL		Persentase Pelaku Usaha yang mendapatkan Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal	10,00	
I.1	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Pelaku Usaha yang mendapatkan Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal	6	
I.1.1	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Kab. Sumenep	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	1	
I.1.2	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Kab. Sumenep	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Memperoleh Insentif dan Kemudahan Berusaha di Daerah	6	

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
I.2	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota		Jumlah Obyek Potensi dan Peluang Usaha	4	
I.2.1	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Sumenep	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	2	
I.2.2	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Kab. Sumenep	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang	1	
II	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL		Persentase Peningkatan Jumlah Investor	3,67	
II.1	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Media Promosi Penanaman Modal	5	
II.1.1	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Kab. Sumenep	Jumlah Peraturan Daerah yang Mengatur Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	1	
II.1.2	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Regional / Nasional	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	5	
III	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL		Persentase Peningkatan Penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB)	3,67	
III.1	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota		Jumlah Nomor Induk Berusaha (NIB) yang diterbitkan	6.400	
III.1.1	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Kab. Sumenep	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	6.400	
III.1.2	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Kab. Sumenep	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal	27	
III.1.3	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Kab. Sumenep	Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu	12	
III.1.4	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Kab. Sumenep	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	6	
IV	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL		Prosentase Jumlah Pelaku Usaha Berizin Yang Beroperasi sesuai Izin Usahanya	90	

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
IV.1	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		Prosentase Jumlah Pelaku Usaha Berizin Yang Beroperasi sesuai Izin Usahanya	6.400	
IV.1.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Kab. Sumenep	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	9	
IV.1.2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Kab. Sumenep	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	287	
IV.1.3	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Kab. Sumenep	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan	17	
V	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL		Kualitas Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	89,00	
V.1	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Pengelolaan Data Realisasi Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan Tepat Waktu	100,00	
V.1.1	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Kab. Sumenep	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	5	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENAGAKERJAAN				
	URUSAN KETENAGAKERJAAN - REVIU				
I	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA		Persentase penggunaan Perencanaan Tenaga Kerja dalam perencanaan program / kegiatan / sub kegiatan	85,00	
I.1	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)		Tersedianya Rencana Tenaga Kerja (RTK)	2	
I.1.1	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Kab. Sumenep	Tersedianya Rencana Tenaga Kerja Makro	1	
I.1.2	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Kab. Sumenep	Tersedianya Rencana Tenaga Kerja Mikro	1	
II	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA		Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja	4,71	
II.1	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi		Jumlah peserta yang dilatih dan mendapatkan sertifikat	89	

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
II.1.1	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Kab. Sumenep	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n-1	93	
II.1.2	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Kab. Sumenep	Jumlah MOU dengan Sektor Swasta Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	2	
II.1.3	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	Kab. Sumenep	Jumlah unit/paket sarana yang disediakan	6	
II.2	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta		Presentase Lembaga Pelatihan Kerja yang bersertifikasi	90,00	
II.2.1	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Kab. Sumenep	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	44	
II.3	Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja		Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja yang difasilitasi dalam proses pendaftaran	44	
II.3.1	Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja secara Terintegrasi	Kab. Sumenep	Jumlah Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi	90	
II.4	Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil		Presentase Peningkatan Produktivitas Perusahaan Kecil	4,00	
II.4.1	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Kab. Sumenep	Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultasi Peningkatan Produktivitas	84	
II.5	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Persentase peningkatan skor Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten	2,50	
II.5.1	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Kab. Sumenep	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah	5	
III	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA		Persentase pencari kerja yang ditempatkan	76,11	
III.1	Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota		Persentase partisipasi angkatan kerja	41,86	
III.1.1	Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja	Kab. Sumenep	Jumlah SDM Pelayanan antar Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Melalui Bimtek dan lain-lain untuk Peningkatan Kompetensi	20	
III.1.2	Pelayanan antar Kerja	Kab. Sumenep	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL	60	
III.1.3	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Kab. Sumenep	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	48	
III.1.4	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Kab. Sumenep	Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitas Layanan ULD	12	
III.1.5	Perluasan Kesempatan Kerja	Kab. Sumenep	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	908	

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
III.2	Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Peningkatan Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS)	1,80	
III.2.1	Penyediaan Sumber Daya Perizinan LPTKS secara Terintegrasi	Kab. Sumenep	Jumlah Perizinan LPTKS yang Terintegrasi	7	
III.2.2	Pengawasan dan Pengendalian LPTKS	Kab. Sumenep	Jumlah LPTKS yang Dilakukan Pengawasan dan Pengendalian Sesuai dengan Aturan yang Berlaku	7	
III.3	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja		Prosentase kualitas Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	81,20	
III.3.1	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Kab. Sumenep	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	4	
III.3.2	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Kab. Sumenep	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)	868	
III.3.3	Job Fair/Bursa Kerja	Kab. Sumenep	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair /Bursa Kerja	61	
III.4	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota		Persentase PMI yang dilayani	90,00	
III.4.1	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Kab. Sumenep	Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	69	
III.4.2	Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran	Kab. Sumenep	Jumlah CPMI yang Terlayani sesuai Prosedur dalam LTSA dan PMI Bermasalah yang Ditangani	20	
III.4.3	Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	Kab. Sumenep	Jumlah PMI Purna yang Diberdayakan	24	
III.5	Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Persentase penggunaan IMTA sesuai peruntukannya	85,00	
III.5.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Sumenep	Jumlah Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja	5	
IV	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL		Presentase Pengesahan Peraturan Perusahaan	100,00	
IV.1	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah peserta sosialisasi pembuatan PP dan PKB	29	
IV.1.1	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Kab. Sumenep	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	24	

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
IV.1.2	Pendaftaran Perjanjian Kerjasama bagi Perusahaan	Kab. Sumenep	Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama	5	
IV.1.3	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Kab. Sumenep	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Teraftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	5.224	
IV.2	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota		Presentase Penyelesaian Perselisihan Perusahaan	88,22	
IV.2.1	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Sumenep	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	5	
IV.2.2	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Sumenep	Jumlah Perkara Perselisihan yang terselesaikan	5	
IV.2.3	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Kab. Sumenep	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi	23	
IV.2.4	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Sumenep	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	23	
IV.2.5	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Kab. Sumenep	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	3.450	
V	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI		Persentase Transmigran yang Berhasil Meningkatkan Taraf Ekonomi dan Sosialnya	85,00	
V.1	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah kunjungan kerjasama antar daerah penempatan transmigrasi	3	
V.1.1	Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Sumenep	Jumlah Transmigran yang Dipindahkan dan Ditempatkan	6	
V.1.2	Penyuluhan Transmigrasi	Kab. Sumenep	Jumlah Calon Transmigran yang Mendapatkan Penyuluhan	3	
V.1.3	Pelatihan Transmigrasi	Kab. Sumenep	Jumlah Calon Transmigran dan/atau Transmigran yang Mendapatkan Pelatihan	3	

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan

Kebijakan Nasional dan Provinsi

RKP Nasional pada 2024 mempunyai arah kebijakan yang diusung dengan tema adalah “ *Mewujudkan Visi Pembangunan Jawa Timur : Masyarakat yang Adil Sejahtera, Unggul dan Berakhlak dengan Tata Kelola Pemerintahan yang Partisipatoris Inklusif Melalui Kerja Bersama dan Bersemangat Gotong Royong* “ dengan pertumbuhan produk domestik bruto antara 5,3–5,7 persen secara *year on year*, dengan Penekanannya di dalam RKP 2024 yang pertama adalah pengurangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem, peningkatan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan, revitalisasi industri dan penguatan riset terapan, penguatan daya saing usaha, pembangunan rendah karbon dan transisi energi, percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas, percepatan pembangunan Ibu Kota Nusantara, dan pelaksanaan Pemilu 2024 dimana Salah satu sumber-sumber pertumbuhannya kalau kita lihat dari sisi pengeluaran adalah investasi, juga berharap tingkatan produktivitas pada UMKM, pertanian dan industri manufaktur yang diharapkan bisa menjadi pengungkit atau *enabler* dalam pertumbuhan ekonomi, sementara untuk tingkat kemiskinan diharapkan dapat ditekan di kisaran 6,5 hingga 7,5 persen, tingkat pengangguran terbuka (TPT) 5 hingga 5,7 persen, rasio gini 0,374 hingga 0,377, indeks pembangunan manusia (IPM) di kisaran 73-74, penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) 27,27, nilai tukar petani (NTP) 105 hingga 108, dan nilai tukar nelayan (NTN) hingga 110.

Sektor industri pengolahan diharapkan menjadi motor pertumbuhan, sementara sektor-sektor yang sebelumnya terdampak Covid-19, seperti perdagangan dan penyediaan akomodasi dan makan minum, diperkirakan akan mengalami akselerasi.

Penanganan kesehatan melalui penguatan sistem kesehatan nasional akan tetap menjadi fondasi bagi pemulihan dan transformasi ekonomi yang berkelanjutan.

Tujuh Prioritas RPJMN yang harus diperhatikan dalam penyusunan RKPD adalah; pertama adalah memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang

berkualitas. Kedua, mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan. Ketiga adalah meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya saing, serta keempat yaitu revolusi mental dan pembangunan kebudayaan. Kelima adalah memperkuat infrastruktur yang mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar. Keenam, membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim, dan Ketujuh memperkuat stabilitas politik, hukum, ketahanan dan keamanan (Polhukhankam) dan transformasi pelayanan publik.

Sedangkan RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 yang salah satu temanya sesuai dengan tugas dan fungsi DPMPTSP dan Tenaga Kerja adalah “ *Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan* ” dan “ *Peningkatan Ketentraman, Ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur* “

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu pada pernyataan Visi dan Misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis lingkungan strategis. Tujuan mengarahkan perumusan strategis, kebijakan, program, dan kegiatan dalam rangka merealisasikan visi dan misi.

Sasaran merupakan penjabaran dari sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja Kabupaten Sumenep dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulanan atau bulanan. Sasaran menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Sasaran memberikan fokus pada penyusunan kegiatan sehingga bersifat spesifik, terinci dapat dicapai dan diupayakan dalam bentuk kuantitatif sehingga dapat diukur.

Sasaran-sasaran Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja Kabupaten Sumenep adalah suatu dasar dalam penilaian dan pemantauan kinerja sehingga merupakan alat pemicu bagi organisasi terhadap sesuatu yang akan dicapai, dan untuk itulah Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja Kabupaten Sumenep telah merumuskan sasaran berikut indikator keberhasilannya.

Adapun Tujuan dan Sasaran RENSTRA sebagaimana table berikut ini.

Tabel 3.2.1
Tujuan dan Sasaran RENSTRA

Adapun keterkaitan Tujuan dan Sasaran RPJMD 2021-2026 dengan Tujuan dan Sasaran RENSTRA sebagaimana tabel berikut ini.

RENSTRA			
TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
Meningkatnya Kualitas Tenaga Kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Meningkatnya pasokan tenaga kerja (<i>Labor Supply</i>)	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)
Meningkatnya efektifitas dan efisiensi penambahan kapital/modal terhadap hasil yang diperoleh	Incremental Capital Output Ratio (ICOR)	Meningkatnya Iklim Investasi	Persentase Peningkatan Realisasi Investasi
Meningkatnya layanan urusan perizinan dan ketenagakerjaan yang inovatif berbasis e-government	IKM layanan perizinan dan ketenagakerjaan	Meningkatnya penerbitan layanan yang lebih cepat dan tepat	Persentase jenis layanan yang diterbitkan lebih cepat dan tepat

Perumusan tujuan dan sasaran PD didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi PD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja dalam dokumen Renstra PD. Dalam bagian ini disajikan tabel penjabaran sasaran daerah ke dalam sasaran PD dengan format sebagai berikut :

Tabel 3.2.2
Prioritas dan Sasaran Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja

NO	PRIORITAS	SASARAN DAERAH	INDIKATOR SASARAN DAERAH	Sasaran Perangkat Daerah	Indikator Sasaran PD (Outcome)
1	2	3	4	5	6
2.	Penguatan Kualitas Produksi Komoditas Unggulan dan Pariwisata serta Penguatan Perdagangan dan UMKM Berbasis Ekonomi Kerakyatan	1. Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan	a. Incremental Capital Output Ratio (ICOR)	a. Meningkatnya Iklim Investasi	a. Persentase Peningkatan Realisasi Investasi
3.	Penguatan Kompetensi tenaga kerja dan akses terhadap kesempatan kerja serta peningkatan keterampilan wirausahawan muda	1. Meningkatnya Kualitas Tenaga Kerja dan partisipasi Perempuan Terhadap pembangunan Daerah	a.. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	a. Meningkatnya pasokan tenaga kerja (<i>Labor Supply</i>)	a. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)
6.	Peningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif	1. Meningkatnya Layanan Publik Yang Inovatif Berbasis E-government	a. Nilai IKM	a. Meningkatnya penerbitan layanan yang lebih cepat dan tepat	a. Persentase jenis layanan yang diterbitkan lebih cepat dan tepat

Selanjutnya disajikan hubungan antara Tujuan Perangkat Daerah dengan Sasaran Perangkat Daerah, seperti pada table berikut :

Tabel 3.2.3
 Tujuan Perangkat Daerah
 Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja

No	Tujuan PD	Indikator Tujuan PD	Target Kinerja Tujuan PD Tahun 2024
1.	Meningkatnya Kualitas Tenaga Kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	2,66 %
2.	Meningkatnya efektifitas dan efisiensi penambahan kapital/modal terhadap hasil yang diperoleh	Incremental Capital Output Ratio (ICOR)	7,20 %
3.	Meningkatnya layanan urusan perizinan dan ketenagakerjaan yang inovatif berbasis e-government	IKM layanan perizinan dan ketenagakerjaan	87 %

Tabel 3.2.4
 Sasaran Perangkat Daerah
 Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja

No	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Target Kinerja Sasaran PD Tahun 2024
1.	Meningkatnya pasokan tenaga kerja (labour supply)	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	75,15 %
2.	Meningkatnya iklim investasi	Persentase peningkatan realisasi investasi	3,73 %
3.	Meningkatnya penerbitan layanan yang lebih cepat dan tepat	Persentase jenis layanan yang diterbitkan lebih cepat dan tepat	98,89 %

Tabel 3.2.5
 Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah
 Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja IKU	Target Kinerja IKU Tahun 2024
1.	Meningkatnya Perluasan Lapangan Kerja dan Ketenagakerjaan	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	75,15 %
2.	Meningkatnya Daya Tarik Investasi	Persentase peningkatan realisasi investasi	3,73 %
3.	Meningkatnya Pelayanan Terpadu	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat unit Layanan Perizinan dan Non Perizinan	98,89 %

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN OPD

Rencana Kerja OPD (Renja OPD) Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja Kabupaten Sumenep merupakan dokumen perencanaan tahunan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja Kabupaten Sumenep dimana penyusunan dokumen tersebut sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja Tahunan OPD.

Rencana program dan kegiatan tahun 2022 memuat uraian disertai dengan indikator-indikator dan target capaian kinerja yang mengacu pada evaluasi RPJMD Tahun 2016-2021 dan RPJMD Provinsi Jawa Timur tahun 2019-2024. Selain itu, rencana program dan kegiatan disusun dengan mencantumkan rencana pendanaan dan sumber pendanaan, baik yang berasal dari dana APBD Kabupaten Sumenep, DBHCHT dan DAK Non Fisik. Rencana program dan kegiatan juga sudah memuat lokasi pelaksanaan dan prakiraan kebutuhan dana pada tahun 2024.

Penetapan target dan pagu indikatif program, kegiatan dan sub kegiatan dalam Renja DPMPTSP dan Tenaga Kerja tahun 2024 telah menggunakan pendekatan money follow program dan Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial. Artinya perencanaan dan penganggaran telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dan arah kebijakan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan perangkat Daerah telah diarahkan sedemikian rupa agar mendukung sasaran prioritas pembangunan tahun 2024. Renja DPMPTSP dan Tenaga Kerja tahun 2024 merupakan dokumen rencana tahunan memuat program dan kegiatan yang merupakan penjabaran RPJMD Kabupaten Sumenep Tahun 2021-2026, dalam rangka untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka pendanaan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun dengan memperhatikan evaluasi pembangunan tahunan dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD, isu strategis yang berkembang, aspirasi masyarakat serta pokok-pokok pikiran DPRD.

4.1. Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan prioritas daerah Tahun 2024 merupakan hasil rangkaian proses perencanaan dengan menggunakan pendekatan

- pendekatan perencanaan baik teknokratik, partisipatif,
- top-down dan bottom-up

Rencana program dan kegiatan tahun 2024 memuat uraian disertai dengan indikator-indikator dan target capaian kinerja yang mengacu pada evaluasi RPJMD Tahun 2021-2026 dan RPJMD Provinsi Jawa Timur tahun 2019-2024. Selain itu, rencana program dan kegiatan disusun dengan mencantumkan rencana pendanaan dan sumber pendanaan, baik yang berasal dari dana APBD Kabupaten Sumenep, DBHCHT dan DAK Non Fisik. Rencana program dan kegiatan juga sudah memuat lokasi pelaksanaan dan prakiraan kebutuhan dana pada tahun 2024.

Dengan melihat hasil analisis kebutuhan, review terhadap rancangan awal RKPD, serta kebijakan pembangunan nasional dan Provinsi Jawa Timur pada tahun 2024 direncanakan terdiri atas 11 (sebelas) program, 26 (dua puluh enam) kegiatan dan 76 (tujuh puluh enam) sub kegiatan yang bersumber dari APBD Kabupaten Sumenep, DBHCHT dan DAK Non Fisik.

Rencana program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja Kabupaten Sumenep Tahun 2024 dan prakiraan maju Tahun 2025 Kabupaten Sumenep sebagaimana Tabel T-C.33 :

Tabel T-C. 33
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2024
dan Prakiraan Maju Tahun 2025
Kabupaten Sumenep

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
2	1 8 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL DAN KETENAGAKERJAAN			38.498.535.758				42.320.579.337	
	BELANJA RUTIN			15.621.819.615				17.156.501.578	
2	1 8 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor		20,00	15.621.819.615		20,00	17.156.501.578	
		Persentase pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran		20,00			20,00		
2	1 8 1 2 1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penanggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun		12	152.479.317		12	167.727.249	
2	1 8 1 2 1 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun sesuai ketentuan	Kab. Sumenep	3	26.620.000	APBD	3	29.282.000	
2	1 8 1 2 1 2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Sumenep	4	13.310.000	APBD	4	14.641.000	

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
2	1	8	1	2	1	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Sumenep	4	6.069.317	APBD		4	6.676.249
2	1	8	1	2	1	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Sumenep	2	106.480.000	APBD		4	117.128.000
2	1	8	1	2	2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun		12	12.329.206.411			12	13.562.127.053
2	1	8	1	2	2	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Sumenep	71	12.315.896.411	APBD		71	13.547.486.053
2	1	8	1	2	2	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan ulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kab. Sumenep	12	13.310.000	APBD		12	14.461.000
2	1	8	1	2	5		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Jenis layanan kepegawaian yang disediakan		5	258.793.890			5	284.673.279
2	1	8	1	2	5	1	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Kab. Sumenep	1	9.317.000	APBD		1	10.248.700
2	1	8	1	2	5	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kab. Sumenep	71	188.208.298	APBD		71	207.029.128
2	1	8	1	2	5	3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kab. Sumenep	3	19.965.000	APBD		3	21.961.500

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
2	1	8	1	2	5	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kab. Sumenep	6	27.993.592	APBD		6	30.792.951
2	1	8	1	2	5	1	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Sumenep	32	13.310.000	APBD		32	14.461.000
2	1	8	1	2	6		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan		50	858.967.756			50	944.864.532
2	1	8	1	2	6	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Sumenep	26	23.824.957	APBD		26	26.207.453
2	1	8	1	2	6	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Sumenep	12	116.532.523	APBD		12	128.185.775
2	1	8	1	2	6	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab. Sumenep	12	243.093.549	APBD		12	267.402.903
								Jumlah item makanan dan minuman yang disediakan	Kab. Sumenep	3				3	
2	1	8	1	2	6	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Sumenep	5	25.550.203	APBD		6	28.105.224
2	1	8	1	2	6	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kab. Sumenep	365	133.447.923	APBD		365	146.792.716
2	1	8	1	2	6	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dalam dan Luar Daerah	131	201.049.280	APBD		131	221.154.208
2	1	8	1	2	6	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Sumenep	4	115.469.321	APBD		4	127.016.253

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
2	1	8	1	2	7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang Diadakan		76	574.584.450			82	604.542.895	
2	1	8	1	2	7	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Kab. Sumenep	1	275.000.000	APBD		1	275.000.000
2	1	8	1	2	7	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kab. Sumenep	67	183.779.806	APBD		67	202.157.786
2	1	8	1	2	7	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kab. Sumenep	8	115.804.644	APBD		8	127.385.109
2	1	8	1	2	8		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah layanan jasa yang disediakan		3	759.266.628			3	835.193.289
2	1	8	1	2	8	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Sumenep	4.111	5.230.145	APBD		4.111	5.753.159
2	1	8	1	2	8	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Sumenep	12	385.415.958	APBD		12	423.957.553
2	1	8	1	2	8	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Sumenep	12	368.620.525	APBD		12	405.482.577
2	1	8	1	2	9		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jenis barang yang dipelihara		4	534.018.936			3	587.420.831
2	1	8	1	2	9	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kab. Sumenep	37	158.556.174	APBD		37	174.411.791

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2	1	1	2	9	5	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Kab. Sumenep	87	36.583.034	APBD		87	40.241.338
2	1	1	2	9	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kab. Sumenep	64	42.778.872	APBD		64	47.056.760
2	1	1	2	9	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Sumenep	2	296.100.856	APBD		2	325.710.942
						Operasional UPTD	Jumlah Sarana dan Prasarana Operasioanal yang ada di UPTD	Kab. Sumenep	5	154.502.227	APBD		6	169.952.450
						URUSAN PENANAMAN MODAL - REVIU				2.308.878.036				19.526.314.969
2	1	0				PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase Pelaku Usaha yang mendapatkan Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal		10,00	345.489.382			10,00	380.038.320
2	1	0	2	0	1	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha yang mendapatkan Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal		7	133.100.000			7	146.410.000
2	1	0	2	0	0	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Kab. Sumenep	1	66.550.000	APBD		1	73.205.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
21822002	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Memperoleh Insentif dan Kemudahan Berusaha di Daerah	Kab. Sumenep	6	66.550.000	APBD		6	73.205.000
2182202	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Obyek Potensi dan Peluang Usaha		3	212.389.382			4	233.628.320
21822021	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Sumenep	2	66.550.000	APBD		2	73.205.000
21822022	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Kab. Sumenep	1	145.839.382	APBD		1	160.423.320
2183	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase Peningkatan Jumlah Investor		3,67	240.482.817			3,73	264.531.099
218321	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Media Promosi Penanaman Modal		6	240.482.817			5	264.531.099
2183211	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah yang Mengatur Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Sumenep	1	74.115.670	APBD		1	81.527.237
2183212	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	Kab. Sumenep	5	166.367.147	APBD		5	183.003.862
2184	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Peningkatan Penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB)		3,67	1.312.255.509			3,73	1.443.481.060

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2 1 8 4 2 0 1	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Nomor Induk Berusaha (NIB) yang diterbitkan		6.400	1.312.255.509			6.639	1.443.481.060
2 1 8 4 2 0 1 1	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Kab. Sumenep	6.400	1.210.000.000	APBD		6.639	1.331.000.000
2 1 8 4 2 0 1 2	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal	Kab. Sumenep	27	60.534.848	APBD		27	66.588.333
2 1 8 4 2 0 1 3	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu	Kab. Sumenep	12	8.445.661	APBD		12	9.290.227
2 1 8 4 2 0 1 4	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Kab. Sumenep	6	33.275.000	APBD		6	36.602.500
2 1 8 5	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Prosentase Jumlah Pelaku Usaha Berizin Yang Beroperasi sesuai Izin Usahnya		6.400	378.524.021			93	416.376.424
2 1 8 5 2 0 1	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Berizin Yang Beroperasi Sesuai Dengan Izin Yang Diterbitkan		6.400	378.524.021			6.639	416.376.424

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
2	1	0	2	0	0	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Kab. Sumenep	9	74.115.670	DAK Non Fisik		9	81.527.237	
2	1	0	2	0	0	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Kab. Sumenep	287	166.367.147	DAK Non Fisik		287	183.003.862	
2	1	0	2	0	0	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan	Kab. Sumenep	17	138.041.204	DAK Non Fisik		17	151.845.325	
2	1	0				PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Kualitas Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal		90,00	32.126.307			91,00	35.338.938	
2	1	0	2	0		Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Data Realisasi Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan Tepat Waktu		100,00	32.126.307			100,00	35.338.938	
2	1	0	2	0	0	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	Kab. Sumenep	5	32.126.307	APBD		5	35.338.938	
						URUSAN KETENAGAKERJAAN - REVIU									
										20.555.738.107				22.419.681.547	

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2	0	0				PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Persentase penggunaan Perencanaan Tenaga Kerja dalam perencanaan program / kegiatan / sub kegiatan		85,00	199.650.000			87,50	219.615.000
2	0	0	2	0	1	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Tersedianya Rencana Tenaga Kerja (RTK)		2	199.650.000			2	219.615.000
2	0	0	2	0	1	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	Kab. Sumenep	1	133.100.000	APBD		1	146.410.000
2	0	0	2	0	2	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Jumlah Perusahaan yang Menyusun RTK Mikro	Kab. Sumenep	1	66.550.000	APBD		1	73.205.000
2	0	0				PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja		4,71	1.378.482.902			4,94	1.516.331.193
2	0	0	2	0	1	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah peserta yang dilatih dan mendapatkan sertifikat		89	1.085.590.603			93	1.194.149.664
2	0	0	2	0	1	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n-1	Kab. Sumenep	93	925.870.603	APBD		93	1.018.457.664
2	0	0	2	0	2	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n	Kab. Sumenep	2	26.620.000	APBD		2	29.282.000
2	0	0	2	0	3	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja	Kab. Sumenep	6	133.100.000	APBD		6	146.410.000
2	0	0	2	0	2	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Prosentase Lembaga Pelatihan Kerja yang bersertifikasi		90,00	79.895.759			95,00	87.885.335

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2	0	0	2	0	0	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	Kab. Sumenep	44	79.895.759	APBD		44	87.885.335
2	0	0	2	0		Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja yang difasilitasi dalam proses pendaftaran		44	66.550.000			46	73.205.000
2	0	0	2	0	0	Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja secara Terintegrasi	Jumlah Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi	Kab. Sumenep	90	66.550.000	APBD		90	73.205.000
2	0	0	2	0		Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	Prosentase Peningkatan Produktivitas Perusahaan Kecil		4,00	79.896.540			4,50	87.886.194
2	0	0	2	0	0	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Jumlah Konsultasi pelaku usaha kecil dan menengah yang dilaksanakan	Kab. Sumenep	84	79.896.540	APBD		84	87.886.194
2	0	0	2	0		Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan skor Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten		2,50	66.550.000			2,50	73.205.000
2	0	0	2	0	0	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah	Kab. Sumenep	5	66.550.000	APBD		5,00	73.205.000
2	0	0				PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase pencari kerja yang ditempatkan		76,11	18.327.999.007			75,51	20.160.798.908
2	0	0	2	0		Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase partisipasi angkatan kerja		41,86	17.766.068.210			41,26	19.542.675.031
2	0	0	2	0	0	Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja	Peningkatan kualitas sarana prasarana pelayanan antar kerja	Kab. Sumenep	20	14.368.211.550	APBD		20	15.805.032.705

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2	0	0	2	0	0	Pelayanan antar Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL	Kab. Sumenep	60	13.310.000	APBD		60	14.641.000
2	0	0	2	0	0	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	Kab. Sumenep	48	26.620.000	APBD		48	29.282.000
2	0	0	2	0	0	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitas Layanan ULD	Kab. Sumenep	12	26.620.000	APBD		12	29.282.000
2	0	0	2	0	0	Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	Kab. Sumenep	908	3.331.306.660	APBD		908	3.664.437.326
2	0	0	2	0	2	Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS)		1,80	79.860.000			1,20	87.846.000
2	0	0	2	0	0	Penyediaan Sumber Daya Perizinan LPTKS secara Terintegrasi	Jumlah Perizinan LPTKS yang Terintegrasi	Kab. Sumenep	7,00	66.550.000	APBD		7,00	73.205.000
2	0	0	2	0	0	Pengawasan dan Pengendalian LPTKS	Jumlah LPTKS yang Dilakukan Pengawasan dan Pengendalian Sesuai dengan Aturan yang Berlaku	Kab. Sumenep	7	13.310.000	APBD		7	14.641.000
2	0	0	2	0	3	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Prosentase kualitas Pengelolaan Informasi Pasar Kerja		81,20	334.413.646			82,60	367.855.011
2	0	0	2	0	0	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Kab. Sumenep	4	53.240.000	APBD		4	58.564.000
2	0	0	2	0	0	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)	Kab. Sumenep	868	114.798.646	APBD		868	126.278.511
2	0	0	2	0	0	Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	Kab. Sumenep	61	166.375.000	APBD		61	183.012.500

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2	0	0	2	0	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase PMI yang dilayani		90,00	147.657.151			85,00	122.030.703
2	0	0	2	0	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	Kab. Sumenep	69	54.487.151	APBD		69	59.935.866
2	0	0	2	0	Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran	Jumlah CPMI yang Terlayani sesuai Prosedur dalam LTSA dan PMI Bermasalah yang Ditangan	Kab. Sumenep	20	66.550.000	APBD		20,00	73.205.000
2	0	0	2	0	Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	Jumlah PMI Purna yang Diberdayakan	Kab. Sumenep	24	26.620.000	APBD		24	29.282.000
2	0	0	2	0	Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penggunaan IMTA sesuai peruntukannya		85,00	12.100.000			82,50	13.000.000
2	0	0	2	0	Koordinasi dan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja	Kab. Sumenep	5	12.100.000	APBD		5	13.000.000
2	0	0			PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Presentase Pengesahan Peraturan Perusahaan		100,00	475.396.769			100,00	522.936.446
2	0	0	2	0	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah peserta sosialisasi pembuatan PP dan PKB		29	174.139.419			24	191.553.360
2	0	0	2	0	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	Kab. Sumenep	24	73.985.511	APBD		24	81.384.062

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2	0	0	2	0	0	Pendaftaran Perjanjian Kerjasama bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama	Kab. Sumenep	5	26.620.000	APBD		5	29.282.000
2	0	0	2	0	0	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	Kab. Sumenep	5.224	73.533.908	APBD		5.224	80.887.298
2	0	0	2	0	2	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Penyelesaian Perselisihan Perusahaan		88,20	301.257.350			84,00	331.383.086
2	0	0	2	0	0	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	Kab. Sumenep	5	74.025.001	APBD		5	81.427.502
2	0	0	2	0	0	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perkara Perselisihan yang terselesaikan	Kab. Sumenep	5	26.620.000	APBD		5	29.282.000
2	0	0	2	0	0	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi	Kab. Sumenep	23	26.620.000	APBD		22	29.282.000
2	0	0	2	0	0	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	Kab. Sumenep	23	147.372.349	APBD		23	162.109.584
2	0	0	2	0	0	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Kab. Sumenep	3.450	26.620.000	APBD		3.450	29.282.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
3 2 3	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase Transmigran yang Berhasil Meningkatkan Taraf Ekonomi dan Sosialnya		85,00	174.209.429			82,50	191.630.371	
3 2 3	0 2 1	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		3	174.209.429			3	191.630.371	
3 2 3	0 2 1	0 4	Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah calon transmigran yang diberangkatkan	Kab. Sumenep	6	81.039.429	APBD	6	89.143.371
3 2 3	0 2 1	0 5	Penyuluhan Transmigrasi	Jumlah KK yang mendapatkan Penyuluhan Transmigrasi	Kab. Sumenep	3	26.620.000	APBD	3	29.282.000
3 2 3	0 2 1	0 6	Pelatihan Transmigrasi	Jumlah KK yang mendapatkan Pelatihan Transmigrasi	Kab. Sumenep	3	66.550.000	APBD	3	73.205.000

4.2. Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah

Pencapaian pelaksanaan Program/Kegiatan yang mendukung terhadap Visi dan Misi Kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Sumenep dan dijabarkan dalam Sasaran Renstra OPD seperti pada tabel berikut :

Tabel 4.2.
Realisasi dan Capaian Kinerja Atas Target Kinerja Sasaran Renstra 2022

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2022		
				TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	CAPAIAN KINERJA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Meningkatnya pasokan tenaga kerja (<i>Labor Supply</i>)	Tingkat partisipasi angkatan kerja	%	75,05	75,12	100,09
2	Meningkatnya iklim investasi	Persentase peningkatan realisasi investasi	%	82,82	155,95	188,29
3	Meningkatnya penerbitan layanan yang lebih cepat dan tepat	Persentase jenis layanan yang diterbitkan lebih cepat dan tepat	%	82,81	86,25	104,15
		Hasil survey kepuasan masyarakat unit layanan perizinan dan nonperizinan	%	82,81	86,25	104,15

4.3. Prioritas Pembangunan

Keterkaitan Prioritas Pembangunan sesuai dengan pelaksanaan Forum Perangkat Daerah dengan menyesuaikan prioritas pembangunan daerah terhadap program/kegiatan Perangkat Daerah seperti yang tertuang pada tabel berikut :

Tabel 4.3.
Keterkaitan Prioritas Pembangunan Daerah dengan Program/Kegiatan
Perangkat Daerah Tahun 2024

Prioritas OPD	Uraian Kegiatan	Lokus	Sub Kegiatan Prioritas	Target	Sumber Dana	Prioritas Daerah
1	2	3	4	5	6	7
<u>Urusan Bidang Ketenagakerjaan</u>						
P1	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Kabupaten Sumenep	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	99 orang	DAU APBD dan DBHCHT	Penguatan Kompetensi tenaga kerja dan akses terhadap kesempatan kerja serta peningkatan keterampilan Wirausahawan muda
P2	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Kabupaten Sumenep	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	46 Lembaga	DAU PMK	Penguatan Kompetensi tenaga kerja dan akses terhadap kesempatan kerja serta peningkatan keterampilan Wirausahawan muda
P3	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Sumenep	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	3500 orang	DAU APBD	Penguatan Kompetensi tenaga kerja dan akses terhadap kesempatan kerja serta peningkatan keterampilan Wirausahawan muda
<u>Urusan Bidang Penanaman Modal</u>						
P1	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Kabupaten Sumenep	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	6639 pelaku usaha	DAU APBD	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang lebih baik menuju birokrasi yang adaptif, lincah, dan dinamis
P1	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Sumenep	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	19 kegiatan usaha	DAU APBD	Penguatan Kualitas Produksi Komoditas Unggulan dan Pariwisata serta PenguatanPerdagangan dan UMKM Berbasis Ekonomi Kerakyatan
P2	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Sumenep	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	5 kegiatan Promosi	DAK Non Fisik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang lebih baik menuju birokrasi yang adaptif, lincah, dan dinamis
P3	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu	Kabupaten Sumenep	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan	13 orang	DAU APBD	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang lebih baik menuju birokrasi yang adaptif,

	Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota		Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan			lincah, dan dinamis
--	---	--	---	--	--	---------------------

4.4. Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)

SPM merupakan standar minimal pelayanan publik yang harus disediakan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat. Hadirnya SPM ini menjadi sebuah jaminan adanya pelayanan minimal yang berhak diperoleh masyarakat dari pemerintah. Terjamin kuantitas dan kualitas minimal dari suatu pelayanan publik yang dapat dinikmati oleh masyarakat, sehingga diharapkan akan terjadi pemerataan pelayanan publik dan menghindari kesenjangan pelayanan urusan Bidang Ketenagakerjaan dan Bidang Penanaman Modal. Penerapan SPM memiliki nilai yang sangat strategis, baik bagi Pemerintah daerah maupun bagi masyarakat sebagai konsumen. Keberadaan SPM dapat dijadikan acuan kualitas dan kuantitas suatu pelayanan publik. Penerapan SPM yang dilakukan oleh setiap kepala daerah dan menjadi tolak ukur kinerja pemerintah. Sebagai tolak ukur SPM di Kabupaten Sumenep disajikan pada tabel berikut :

Tabel 4.4.
Capaian Standart Pelayanan Minimal (SPM)
Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja

No	Indikator Kinerja Utama Daerah	Satuan	Target	Realisasi	Interpretasi Capaian IKU
1	2	3	4	5	6
B	ASPEK PELAYANAN UMUM				
2	Fokus Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar				
2.07	Ketenagakerjaan				
2.07.1	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	75,05	75,12	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) menunjukkan suatu indikator ketenagakerjaan yang memberikan gambaran tentang penduduk yang bekerja, sementara tidak

No	Indikator Kinerja Utama Daerah	Satuan	Target	Realisasi	Interpretasi Capaian IKU
1	2	3	4	5	6
					bekerja, ataupun yang menganggur. TPAK Sumenep pada tahun 2022 dilihat dari target sudah mencapai target yang ditetapkan dalam Renstra, akan tetapi kalau dilihat dari Realisasi Tahun 2021 mengalami penurunan dari 75,63 persen pada tahun 2021 menjadi 75,12 persen di tahun 2022.
2.18	Penanaman Modal				
2.18.1	Jumlah Investor	Investor	5.958	6.440	Capaian Target Kinerja Jumlah Investor dapat terpenuhi dari target yang akan dicapai, dengan realisasi Tahun 2022 sebanyak 6.440 investor sehingga dapat dimaknai adanya tingkat kepercayaan yang tinggi dari investor untuk melakukan penanaman modalnya di Kabupaten Sumenep
2.18.2	Jumlah Nilai Investasi	Rp	1.139.512.157.409	1.777.132.906.076	Jumlah Nilai Investasi yang meningkat menunjukkan bahwa potensi investasi / peluang investasi / proyek investasi yang ada di Kabupaten Sumenep dapat memberikan keuntungan yang besar bagi penanam modal
2.18.3	Persentase Peningkatan Nilai Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri	%	82,82	86,25	Capaian Target Kinerja Persentase Peningkatan Nilai Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri belum terpenuhi, namun dibandingkan dengan Tahun 2021 ada peningkatan sebesar 3,43% sehingga dapat dimaknai bahwa potensi investasi / peluang

No	Indikator Kinerja Utama Daerah	Satuan	Target	Realisasi	Interpretasi Capaian IKU
1	2	3	4	5	6
					investasi / proyek investasi yang ada bisa dimanfaatkan dengan baik oleh penanaman modal dalam negeri.
C	ASPEK DAYA SAING DAERAH				
3.	Fokus Iklim Berinvestasi				
3.3.	Persentase Penerbitan Izin Tepat Waktu	%	100	100	Capaian Target Kinerja Persentase Penerbitan Izin Tepat Waktu terpenuhi, sehingga bisa dimaknai bahwa tingkat profesionalisme dari petugas front/back office dan Tim Teknis semakin meningkat.

4.5. Pecapaian Indikator Kinerja Utama (IKU)

Pada RENSTRA 2021-2026 Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Sumenep telah ditentukan Sasaran dan Indikator Sasaranya, yang merupakan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah yaitu:

1. Meningkatnya pasokan tenaga kerja (labour supply) dengan indikator Tingkat partisipasi angkatan kerja.
2. Meningkatnya Iklim Investasi dengan indikator Persentase peningkatan realisasi investasi.
3. Meningkatnya penerbitan layanan yang lebih cepat dan tepat dengan indikator Persentase jenis layanan yang diterbitkan lebih cepat dan tepat.

Capaian Kinerja sebagaimana table berikut :

Tabel 4.5.
Capaian Kinerja IKU Perangkat Daerah
Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja

No	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Rumus Perhitungan	Satuan	Target	Realisasi	Interpretasi Capaian IKU
1	2	3	4	5	6	7
1	Tingkat partisipasi angkatan kerja	$TPAK = PK/PUK \times 100\%$	%	75,05	75,12	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) menunjukkan suatu indikator ketenagakerjaan yang memberikan gambaran tentang penduduk yang bekerja, sementara tidak bekerja, ataupun yang menganggur. TPAK Sumenep pada tahun 2022 dilihat dari target sudah mencapai target yang ditetapkan dalam Renstra, akan tetapi kalau dilihat dari Realisasi Tahun 2021 mengalami penurunan dari 75,63 persen pada tahun 2021 menjadi 75,12 persen di tahun 2022.

No	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Rumus Perhitungan	Satuan	Target	Realisasi	Interpretasi Capaian IKU
2	Persentase peningkatan Realisasi Investasi	$(RIT) - (RIT-1) / (RIT-1) \times 100\%$	%	3,61	55,95	Capaian Target Kinerja Persentase Peningkatan Realisasi Investasi terpenuhi, namun dibandingkan dengan Tahun 2021 ada peningkatan sehingga dapat dimaknai bahwa potensi investasi/pelempangan investasi/proyek investasi yang ada di Kabupaten Sumenep masih dapat memberikan keuntungan yang besar bagi penanam modal
3.	Persentase jenis layanan yang diterbitkan lebih cepat dan tepat	$(\text{Total nilai persepsi per pertanyaan} / \text{Total unsur yang terisi}) \times \text{Nilai Penimbang}$	%	82,81	86,25	Capaian Target Kinerja Persentase jenis layanan yang diterbitkan lebih cepat dan tepat dapat terpenuhi, diukur dengan tingkat indeks kepuasan masyarakat dari target 82,81 persen Tahun 2022 terealisasi 86,25 persen.
4	Indeks Reformasi Birokrasi	Skor	Katagori	BB	A	Indeks Reformasi Birokrasi pada katagori A atau MEMUASKAN dapat dipahami bahwa DPMPSTP telah melakukan 6 (enam) unsur Reformasi Birokrasi dengan baik

Hasil perumusan program dan kegiatan disajikan dalam tabel dengan format sebagai berikut :

Tabel 4.5.1.
Sasaran dan Program/Kegiatan
Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja

No	Sasaran PD	Nama Program / Kegiatan
1.	Meningkatnya pasokan tenaga kerja (labour supply)	<p>Program : PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA</p> <p><i>Kegiatan :</i> Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi Sub Kegiatan : Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi</p> <p><i>Kegiatan :</i> Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta Sub Kegiatan : Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta</p> <p>Program : PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA</p> <p><i>Kegiatan :</i> Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan : Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)</p>
2.	Meningkatnya Iklim Investasi	<p>Program : PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL</p> <p><i>Kegiatan :</i> Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Sub kegiatan : Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal</p>

		<p>Program : PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL</p> <p><i>Kegiatan :</i> Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</p> <p>Sub Kegiatan : Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota</p>
3.	Meningkatnya penerbitan layanan yang lebih cepat dan tepat	<p>Program : PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL</p> <p><i>Kegiatan :</i> Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota</p> <p>Sub Kegiatan : Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik</p> <p>Program : PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL</p> <p><i>Kegiatan :</i> Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</p> <p>Sub Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal</p> <p>Sub Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal</p>

Tabel 4.5.2.
Rekapitulasi Program/Kegiatan Berdasarkan Prioritas Pembangunan Tahun 2024
Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja

No	Prioritas Pembangunan	Nama Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan prioritas	Pagu Indikatif (Rp.)	Keterangan
2.	Penguatan Kualitas Produksi Komoditas Unggulan dan Pariwisata serta Penguatan Perdagangan dan UMKM Berbasis Ekonomi Kerakyatan	<p>Program : PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL</p> <p><i>Kegiatan :</i> <i>Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</i></p> <p>Sub Kegiatan : Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal</p> <p>Program : PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL</p> <p><i>Kegiatan :</i> <i>Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</i></p> <p>Sub Kegiatan : Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota</p>	<p>60.500.000,-</p> <p>60.500.000,-</p> <p>60.500.000,-</p> <p>132.581.256,-</p> <p>132.581.256,-</p> <p>132.581.256,-</p>	
3.	Penguatan Kompetensi tenaga kerja dan akses terhadap kesempatan kerja serta peningkatan keterampilan wirausahawan muda	<p>Program : PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA</p> <p><i>Kegiatan :</i> <i>Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi</i></p> <p>Sub Kegiatan : Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster</p>	<p>1.430.786.449,-</p> <p>1.351.400.918,-</p> <p>1.351.400.918,-</p>	

No	Prioritas Pembangunan	Nama Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan prioritas	Pagu Indikatif (Rp.)	Keterangan
		<p>Kompetensi Kegiatan : Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta</p> <p>Sub Kegiatan : Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta</p> <p>Program : PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA</p> <p>Kegiatan : Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota</p> <p>Sub Kegiatan : Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)</p>	<p>79.385.531,-</p> <p>79.385.531,-</p> <p>54.139.187,-</p> <p>54.139.187,-</p> <p>54.139.187,-</p>	
6	Peningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif	<p>Program : PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL</p> <p>Kegiatan : Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota</p> <p>Sub Kegiatan : Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik</p> <p>Program : PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL</p> <p>Kegiatan : Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</p> <p>Sub Kegiatan :</p>	<p>808.230.921,-</p> <p>808.230.921,-</p> <p>808.230.921,-</p> <p>276.734.865,-</p> <p>276.734.865,-</p> <p>151.242.861,-</p>	

No	Prioritas Pembangunan	Nama Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan prioritas	Pagu Indikatif (Rp.)	Keterangan
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal Sub Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	125.492.004,-	

Tabel 4.5.3
Kelompok Sasaran Dan Pagu Indikatif

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (PERMENDAGRI NO 90 TAHUN 2019)	INDIKATOR OUTCOM / INDIKATOR KINERJA (OUTPUT)	PAGU INDIKATIF (Rp.)					
						2021	2022	2023	2024	2025	2026
				BELANJA RUTIN		11.780.292 .724	12.958.321 .996	14.226.654 .196	15.621.819. 616	17.156.501 .577	18.844.651 .735
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran	11.780.292 .724	12.958.321 .996	14.226.654 .196	15.621.819. 616	17.156.501 .577	18.844.651 .735
					Persentase pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran						
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah penyusunan dokumen perencanaan, penanggangan dan evaluasi kinerja perangkat daerah	114.559.96 8	126.015.96 5	138.617.56 1	152.479.31 7	167.727.24 9	184.499.97 4
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun sesuai ketentuan	20.000.000	22.000.000	24.200.000	26.620.000	29.282.000	32.210.200
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA yang disusun sesuai ketentuan	10.000.000	11.000.000	12.100.000	13.310.000	14.641.000	16.105.100
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja yang disusun sesuai ketentuan	4.559.968	5.015.965	5.517.561	6.069.317	6.676.249	7.343.874
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah pelaksanaan evaluasi kinerja perangkat daerah	80.000.000	88.000.000	96.800.000	106.480.00 0	117.128.00 0	128.840.80 0
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah	9.263.115. 260	10.189.426 .786	11.208.369 .465	12.329.206. 411	13.562.127 .053	14.918.339 .758
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang diberi gaji dan tunjangan	9.253.115.2 60	10.178.426. 786	11.196.269. 465	12.315.896. 411	13.547.486. 053	14.902.234. 658
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan ulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan yang disusun	10.000.000	11.000.000	12.100.000	13.310.000	14.641.000	16.105.100

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (PERMENDAGRI NO 90 TAHUN 2019)	INDIKATOR OUTCOM / INDIKATOR KINERJA (OUTPUT)	PAGU INDIKATIF (Rp.)					
						2021	2022	2023	2024	2025	2026
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pemenuhan administrasi kepegawaian daerah	194.435.680	213.879.248	235.267.173	258.793.890	284.673.279	313.140.607
				Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	jumlah sarana dan prasarana disiplin pegawai yang disediakan	7.000.000	7.700.000	8.470.000	9.317.000	10.248.700	11.273.570
				Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	jumlah pengadaan pakaian dinas ASN	141.403.680	155.544.048	171.098.453	188.208.298	207.029.128	227.732.041
				Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah jenis pengelolaan kepegawaian tepat waktu	15.000.000	16.500.000	18.150.000	19.965.000	21.961.500	24.157.650
				Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang mengikuti pelatihan sesuai tugas dan fungsi	21.032.000	23.135.200	25.448.720	27.993.592	30.792.951	33.872.246
				Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah peserta bimbingan teknis	10.000.000	11.000.000	12.100.000	13.310.000	14.641.000	16.105.100
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah pemenuhan penyediaan administrasi umum perangkat daerah	645.355.189	709.890.708	780.879.779	858.967.757	944.864.532	1.039.350.985
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis/item komponen instalasi listrik yang disediakan	17.900.043	19.690.047	21.659.052	23.824.957	26.207.453	28.828.198
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	87.552.609	96.307.870	105.938.657	116.532.523	128.185.775	141.004.352
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	jumlah jenis ATK yang disediakan	182.639.781	200.903.759	220.994.135	243.093.549	267.402.903	294.143.194
					jumlah makan dan minum yang disediakan						
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	jumlah barang cetak dan penggandaan yang	19.196.246	21.115.871	23.227.458	25.550.203	28.105.224	30.915.746

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (PERMENDAGRI NO 90 TAHUN 2019)	INDIKATOR OUTCOM / INDIKATOR KINERJA (OUTPUT)	PAGU INDIKATIF (Rp.)					
						2021	2022	2023	2024	2025	2026
					disediakan						
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan Perketentuan Perundang-undangan yang disediakan	100.261.400	110.287.540	121.316.294	133.447.923	146.792.716	161.471.987
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan	151.051.300	166.156.430	182.772.073	201.049.280	221.154.208	243.269.629
				Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	jumlah arsip yang dikelola	86.753.810	95.429.191	104.972.110	115.469.321	127.016.253	139.717.879
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah jenis barang yang diadakan	475.082.231	522.590.454	547.349.500	574.584.450	604.542.895	637.497.184
				Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit kendaraan dinas/operasional yang disediakan	250.000.000	275.000.000	275.000.000	275.000.000	275.000.000	275.000.000
				Pengadaan Mebel	Jumlah mebel yang diadakan	138.076.488	151.884.137	167.072.550	183.779.806	202.157.786	222.373.565
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan	87.005.743	95.706.318	105.276.949	115.804.644	127.385.109	140.123.619
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jenis jasa penunjang yang diadakan	570.448.254	627.493.080	690.242.388	759.266.627	835.193.289	918.712.618
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah jasa pengantar surat	3.929.485	4.322.434	4.754.677	5.230.145	5.753.159	6.328.475
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Tagihan Listrik, Air, Telepon dan Internet	289.568.713	318.525.585	350.378.143	385.415.958	423.957.553	466.353.309
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga outsourcing yang disediakan	276.950.056	304.645.062	335.109.568	368.620.525	405.482.577	446.030.835

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (PERMENDAGRI NO 90 TAHUN 2019)	INDIKATOR OUTCOM / INDIKATOR KINERJA (OUTPUT)	PAGU INDIKATIF (Rp.)					
						2021	2022	2023	2024	2025	2026
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jenis barang yang dipelihara	401.216.331	441.337.964	485.471.761	534.018.937	587.420.830	646.162.913
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	119.125.600	131.038.160	144.141.976	158.556.174	174.411.791	191.852.970
				Pemeliharaan Mebel	Pemeliharaan Mebel	27.485.375	30.233.913	33.257.304	36.583.034	40.241.338	44.265.471
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	32.140.400	35.354.440	38.889.884	42.778.872	47.056.760	51.762.436
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara	222.464.956	244.711.452	269.182.597	296.100.856	325.710.942	358.282.036
				Operasional UPTD	Jumlah Sarana dan Prasarana Operasioanal yang ada di UPTD	116.079.810	127.687.791	140.456.570	154.502.227	169.952.450	186.947.695
				URUSAN PENANAMAN MODAL - REVIU		1.436.742.027	1.908.163.667	2.098.980.034	2.308.878.037	2.539.765.841	2.793.742.425
Meningkatkan daya tarik Investaasi	Persentase peningkatan realisasi investasi	Meningkatnya kualitas pelayanan penanaman modal	Indeks Kepuasan pelayanan penanaman modal	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase Pelaku Usaha yang mendapatkan Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal	259.571.286	285.528.415	314.081.256	345.489.382	380.038.320	418.042.152
				Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha yang mendapatkan Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal	100.000.000	110.000.000	121.000.000	133.100.000	146.410.000	161.051.000

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (PERMENDAGRI NO 90 TAHUN 2019)	INDIKATOR OUTCOM / INDIKATOR KINERJA (OUTPUT)	PAGU INDIKATIF (Rp.)					
						2021	2022	2023	2024	2025	2026
				Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah PERKADA Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	50.000.000	55.000.000	60.500.000	66.550.000	73.205.000	80.525.500
				Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Pelaku Usaha yang Memanfaatkan Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal sesuai dengan peruntukannya	50.000.000	55.000.000	60.500.000	66.550.000	73.205.000	80.525.500
				Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Obyek Potensi dan Peluang Usaha	159.571.286	175.528.415	193.081.256	212.389.382	233.628.320	256.991.152
				Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya PERKADA RUPMD	50.000.000	55.000.000	60.500.000	66.550.000	73.205.000	80.525.500
				Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Tersedianya Peta Potensi dan Peluang Investasi	109.571.286	120.528.415	132.581.256	145.839.382	160.423.320	176.465.652
				PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase Peningkatan Jumlah Investor	180.678.300	198.746.130	218.620.743	240.482.817	264.531.099	290.984.209
				Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Media Promosi Penanaman Modal	180.678.300	198.746.130	218.620.743	240.482.817	264.531.099	290.984.209
				Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Jumlah Dokumen Rumusan Strategi Promosi Penanaman Modal	55.684.200	61.252.620	67.377.882	74.115.670	81.527.237	89.679.961
				Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan promosi penanaman modal yang dilakukan	124.994.100	137.493.510	151.242.861	166.367.147	183.003.862	201.304.248

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (PERMENDAGRI NO 90 TAHUN 2019)	INDIKATOR OUTCOM / INDIKATOR KINERJA (OUTPUT)	PAGU INDIKATIF (Rp.)					
						2021	2022	2023	2024	2025	2026
				PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Peningkatan Penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB)	687.964.77 1	1.084.508. 685	1.192.959. 554	1.312.255.5 09	1.443.481. 060	1.587.829. 166
				Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Nomor Induk Berusaha (NIB) yang diterbitkan	687.964.77 1	1.084.508. 685	1.192.959. 554	1.312.255.5 09	1.443.481. 060	1.587.829. 166
				Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Nomor Induk Berusaha (NIB) yang berlaku efektif	611.138.69 3	1.000.000.0 00	1.100.000.0 00	1.210.000.0 00	1.331.000.0 00	1.464.100.0 00
				Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah Pelaku Usaha Yang Memenuhi Komitmen Izin Usaha	45.480.728	50.028.800	55.031.680	60.534.848	66.588.333	73.247.167
				Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah Pengaduan Yang Selesai Ditindaklanjuti	6.345.350	6.979.885	7.677.874	8.445.661	9.290.227	10.219.250
				Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah Dokumen Rekomendasi Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	25.000.000	27.500.000	30.250.000	33.275.000	36.602.500	40.262.750
				PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Jumlah Pelaku Usaha Berizin Yang Beroperasi	284.390.70 0	312.829.77 0	344.112.74 7	378.524.02 2	416.376.42 4	458.014.06 6
				Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Berizin Yang Beroperasi Sesuai Dengan Izin Yang Diterbitkan	284.390.70 0	312.829.77 0	344.112.74 7	378.524.02 2	416.376.42 4	458.014.06 6

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (PERMENDAGRI NO 90 TAHUN 2019)	INDIKATOR OUTCOM / INDIKATOR KINERJA (OUTPUT)	PAGU INDIKATIF (Rp.)					
						2021	2022	2023	2024	2025	2026
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Dokumen Profil Pelaku Usaha Yang Dipantau	55.684.200	61.252.620	67.377.882	74.115.670	81.527.237	89.679.961
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Pelaku Usaha yang Menjadi Peserta Pembinaan/Sosialisasi Pelaksanaan Penanaman Modal	124.994.10 0	137.493.51 0	151.242.86 1	166.367.14 7	183.003.86 2	201.304.24 8
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Dokumen Berita Acara Hasil Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	103.712.40 0	114.083.64 0	125.492.00 4	138.041.20 4	151.845.32 5	167.029.85 7
				PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Kualitas Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	24.136.970	26.550.667	29.205.734	32.126.307	35.338.938	38.872.832
				Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Data Realisasi Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan Tepat Waktu	24.136.970	26.550.667	29.205.734	32.126.307	35.338.938	38.872.832
				Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Dimanfaatkan oleh Pemangku Kepentingan	24.136.970	26.550.667	29.205.734	32.126.307	35.338.938	38.872.832
				URUSAN KETENAGAKERJAAN - REVIU		15.403.830 .283	16.944.213 .311	18.638.634 .642	20.502.498. 106	22.552.747 .917	24.808.022 .708
Meningkatkan Kualitas dan Produktifitas Ketenaga Kerjaan	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Meningkatnya Perluasan Lapangan Kerja dan Ketenaga	Meningkatnya Kesempatan Berusaha	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Persentase penggunaan Perencanaan Tenaga Kerja dalam perencanaan program / kegiatan / sub kegiatan	100.000.00 0	110.000.00 0	121.000.00 0	133.100.00 0	146.410.00 0	161.051.00 0

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (PERMENDAGRI NO 90 TAHUN 2019)	INDIKATOR OUTCOM / INDIKATOR KINERJA (OUTPUT)	PAGU INDIKATIF (Rp.)					
						2021	2022	2023	2024	2025	2026
		Kerjaan									
				Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Tersedianya Rencana Tenaga Kerja (RTK)	100.000.000	110.000.000	121.000.000	133.100.000	146.410.000	161.051.000
				Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Tersedianya Rencana Tenaga Kerja Makro	50.000.000	55.000.000	60.500.000	66.550.000	73.205.000	80.525.500
				Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Tersedianya Rencana Tenaga Kerja Mikro	50.000.000	55.000.000	60.500.000	66.550.000	73.205.000	80.525.500
				PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja	1.035.674.607	1.139.242.068	1.253.166.275	1.378.482.902	1.516.331.192	1.667.964.311
				Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah peserta yang dilatih dan mendapatkan sertifikat	815.620.288	897.182.317	986.900.549	1.085.590.603	1.194.149.664	1.313.564.630
				Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah peserta yang dilatih	695.620.288	765.182.317	841.700.549	925.870.603	1.018.457.664	1.120.303.430
				Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah MOU dengan Sektor Swasta Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	20.000.000	22.000.000	24.200.000	26.620.000	29.282.000	32.210.200
				Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	Jumlah unit/paket sarana yang disediakan	100.000.000	110.000.000	121.000.000	133.100.000	146.410.000	161.051.000
				Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Prosentase Lembaga Pelatihan Kerja yang bersertifikasi	60.026.866	66.029.553	72.632.508	79.895.759	87.885.335	96.673.868
				Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah pembinaan lembaga pelatihan kerja swasta	60.026.866	66.029.553	72.632.508	79.895.759	87.885.335	96.673.868

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (PERMENDAGRI NO 90 TAHUN 2019)	INDIKATOR OUTCOM / INDIKATOR KINERJA (OUTPUT)	PAGU INDIKATIF (Rp.)					
						2021	2022	2023	2024	2025	2026
				Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja yang difasilitasi dalam proses pendaftaran	50.000.000	55.000.000	60.500.000	66.550.000	73.205.000	80.525.500
				Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja secara Terintegrasi	Peningkatan kualitas sarana prasarana perizinan Lembaga Pelatihan Kerja	50.000.000	55.000.000	60.500.000	66.550.000	73.205.000	80.525.500
				Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	Prosentase Peningkatan Produktivitas Perusahaan Kecil	60.027.453	66.030.198	72.633.218	79.896.540	87.886.194	96.674.813
				Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Jumlah Konsultasi pelaku usaha kecil dan menengah yang dilaksanakan	60.027.453	66.030.198	72.633.218	79.896.540	87.886.194	96.674.813
				Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan skor Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten	50.000.000	55.000.000	60.500.000	66.550.000	73.205.000	80.525.500
				Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Skor Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	50.000.000	55.000.000	60.500.000	66.550.000	73.205.000	80.525.500
				PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase pencari kerja yang ditempatkan	13.780.096	15.158.106	16.673.917	18.341.309.	20.175.439	22.192.983
				Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase partisipasi angkatan kerja	.925	.617	.279	007	.908	.899
				Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase partisipasi angkatan kerja	13.347.910	14.682.701	16.150.971	17.766.068.	19.542.675	21.496.942
				Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja	Peningkatan kualitas sarana prasarana pelayanan antar kerja	.000	.000	.100	210	.031	.534
				Pelayanan antar Kerja	Peningkatan kualitas sarana prasarana pelayanan antar kerja	10.795.050.	11.874.555.	13.062.010.	14.368.211.	15.805.032.	17.385.535.
				Pelayanan antar Kerja	Persentase tingkat kesempatan kerja	000	000	500	550	705	976
				Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Persentase tingkat kesempatan kerja	10.000.000	11.000.000	12.100.000	13.310.000	14.641.000	16.105.100
				Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Jumlah peserta Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	20.000.000	22.000.000	24.200.000	26.620.000	29.282.000	32.210.200
				Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah tenaga kerja disabilitas yang terlayani	20.000.000	22.000.000	24.200.000	26.620.000	29.282.000	32.210.200
				Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah pencari kerja yang mendaftar	2.502.860.0	2.753.146.0	3.028.460.6	3.331.306.6	3.664.437.3	4.030.881.0
						00	00	00	60	26	59

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (PERMENDAGRI NO 90 TAHUN 2019)	INDIKATOR OUTCOM / INDIKATOR KINERJA (OUTPUT)	PAGU INDIKATIF (Rp.)					
						2021	2022	2023	2024	2025	2026
				Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS)	60.000.000	66.000.000	72.600.000	79.860.000	87.846.000	96.630.600
				Penyediaan Sumber Daya Perizinan LPTKS secara Terintegrasi	Peningkatan kualitas sarana prasarana perizinan LPTKS	50.000.000	55.000.000	60.500.000	66.550.000	73.205.000	80.525.500
				Pengawasan dan Pengendalian LPTKS	Jumlah dokumen Berita Acara Pemeriksaan Pengawasan dan Pengendalian LPTKS	10.000.000	11.000.000	12.100.000	13.310.000	14.641.000	16.105.100
				Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Prosentase kualitas Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	251.249.92₂	276.374.91₄	304.012.40₅	334.413.64₆	367.855.01₁	404.640.51₂
				Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Updating sistem informasi Pasar Kerja	40.000.000	44.000.000	48.400.000	53.240.000	58.564.000	64.420.400
				Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah pencari kerja yang terdaftar secara online	86.249.922	94.874.914	104.362.40 ₅	114.798.64 ₆	126.278.51 ₁	138.906.36 ₂
				Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah perusahaan peserta job fair	125.000.00 ₀	137.500.00 ₀	151.250.00 ₀	166.375.00 ₀	183.012.50 ₀	201.313.75 ₀
				Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase PMI yang dilayani	110.937.00₃	122.030.70₃	134.233.77₄	147.657.15₁	162.422.86₆	178.665.15₃
				Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI) ilegal yang dapat di minimalisir	40.937.003	45.030.703	49.533.774	54.487.151	59.935.866	65.929.453
				Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran	Peningkatan kualitas sarana dan prasarana Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran	50.000.000	55.000.000	60.500.000	66.550.000	73.205.000	80.525.500
				Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	Jumlah Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan yang bekerja kembali	20.000.000	22.000.000	24.200.000	26.620.000	29.282.000	32.210.200

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (PERMENDAGRI NO 90 TAHUN 2019)	INDIKATOR OUTCOM / INDIKATOR KINERJA (OUTPUT)	PAGU INDIKATIF (Rp.)					
						2021	2022	2023	2024	2025	2026
				Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penggunaan IMTA sesuai peruntukannya	10.000.000	11.000.000	12.100.000	13.310.000	14.641.000	16.105.100
				Koordinasi dan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja	10.000.000	11.000.000	12.100.000	13.310.000	14.641.000	16.105.100
				PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Presentase Pengesahan Peraturan Perusahaan	357.172.629	392.889.891	432.178.881	475.396.769	522.936.445	575.230.090
				Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah peserta sosialisasi pembuatan PP dan PKB	130.833.522	143.916.875	158.308.562	174.139.418	191.553.360	210.708.696
				Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Jumlah perusahaan yang membentuk LKS Bipartit	55.586.409	61.145.050	67.259.555	73.985.511	81.384.062	89.522.468
				Pendaftaran Perjanjian Kerjasama bagi Perusahaan	Jumlah perjanjian kerja sama yang dicatat	20.000.000	22.000.000	24.200.000	26.620.000	29.282.000	32.210.200
				Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah pekerja/buruh yang menjadi peserta program BPJS Ketenaga Kerjaan	55.247.113	60.771.825	66.849.007	73.533.908	80.887.298	88.976.028
				Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Penyelesaian Perselisihan Perusahaan	226.339.106	248.973.017	273.870.318	301.257.350	331.383.085	364.521.394

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (PERMENDAGRI NO 90 TAHUN 2019)	INDIKATOR OUTCOM / INDIKATOR KINERJA (OUTPUT)	PAGU INDIKATIF (Rp.)					
						2021	2022	2023	2024	2025	2026
				Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah mediasi penyelesaian perselisihan	55.616.079	61.177.687	67.295.456	74.025.001	81.427.502	89.570.252
				Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penurunan perselisihan hubungan Industrial yang masuk ke Pengadilan HI	20.000.000	22.000.000	24.200.000	26.620.000	29.282.000	32.210.200
				Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Tersedianya data keanggotaan SP/SB yang terverifikasi	20.000.000	22.000.000	24.200.000	26.620.000	29.282.000	32.210.200
				Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah ketenagan bekerja	110.723.027	121.795.330	133.974.863	147.372.349	162.109.584	178.320.542
				Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Persentase pekerja dan buruh peserta program BPJS Ketenaga Kerjaan	20.000.000	22.000.000	24.200.000	26.620.000	29.282.000	32.210.200
				PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase Transmigran yang Berhasil Meningkatkan Taraf Ekonomi dan Sosialnya	130.886.122	143.974.734	158.372.208	174.209.429	191.630.371	210.793.409
				Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kunjungan kerjasama antar daerah penempatan transmigrasi	130.886.122	143.974.734	158.372.208	174.209.429	191.630.371	210.793.409

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (PERMENDAGRI NO 90 TAHUN 2019)	INDIKATOR OUTCOM / INDIKATOR KINERJA (OUTPUT)	PAGU INDIKATIF (Rp.)					
						2021	2022	2023	2024	2025	2026
				Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah calon transmigran yang diberangkatkan	60.886.122	66.974.734	73.672.208	81.039.429	89.143.371	98.057.709
				Penyuluhan Transmigrasi	Jumlah KK yang mendapatkan Penyuluhan Transmigrasi	20.000.000	22.000.000	24.200.000	26.620.000	29.282.000	32.210.200
				Pelatihan Transmigrasi	Jumlah KK yang mendapatkan Pelatihan Transmigrasi	50.000.000	55.000.000	60.500.000	66.550.000	73.205.000	80.525.500
JUMLAH						28.620.865. 033	31.810.698. 974	34.964.268. 872	38.433.195. 759	42.249.015. 335	46.446.416. 868

BAB V

P E N U T U P

Rencana Kerja (RENJA) SKPD menjadi sangat penting artinya dalam menghadapi berbagai persoalan-persoalan pembangunan sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengakomodasikan berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedepankan perencanaan berkelanjutan (sustainable development). RENJA SKPD merupakan sarana untuk mengakomodir isu-isu strategis/permasalahan pembangunan yang difokuskan penanganannya serta menjadi kebutuhan masyarakat dan daerah. Rencana Kerja (RENJA) selain menjadi dokumen rencana pelaksanaan kegiatan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja Kabupaten Sumenep pada Tahun 2024, juga berfungsi sebagai sarana peningkatan kinerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja Kabupaten Sumenep dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. RENJA juga memuat tingkat capaian, serta kendala dalam pelaksanaan program/kegiatan pada tahun sebelumnya, yang menjadi pedoman dalam pengambilan keputusan serta penyusunan program dan kegiatan pada tahun-tahun berikutnya. RENJA sebagai dokumen action plan memuat prioritas program/kegiatan dalam mewujudkan visi dan misi Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja Kabupaten Sumenep serta mendukung arahan prioritas pembangunan daerah sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Sumenep Tahun 2022. Beberapa kaedah-kaedah dalam Renja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja Kabupaten Sumenep, sebagai berikut :

1. Seluruh dokumen perencanaan yang disiapkan oleh Pemerintah Kabupaten Sumenep merupakan satu kesatuan yang saling terkait satu sama lainnya, mulai dari tingkat kebijakan, rencana kerja dan penganggaran.

2. Renja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja Kabupaten Sumenep disusun dengan berpedoman dan merupakan penjabaran dari Renstra Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja Kabupaten Sumenep.
3. Renja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja Kabupaten Sumenep merupakan pedoman dalam penyusunan RKA-SKPD.
4. Dokumen Rencana Kerja yang wajib disusun setiap tahun oleh masing-masing SKPD.
5. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah menyiapkan Renja-SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mengacu kepada rancangan awal RKPD.

Agar Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 dapat ditetapkan tepat waktu, berikut ini jadwal penyelesaian dan penyempurnaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 :

No	Kegiatan	Jadwal	Keterangan
1.	Rancangan Awal Renja PD	Minggu IV Desember 2022	Bappeda
2.	Verifikasi Akhir Renja PD oleh Bidang Sektoral Bappeda	Minggu I-II Juli 2023	Bappeda
3.	Reviu APIP	Minggu II-III Juli 2023	Inspektorat
4.	Penetapan Renja PD	Minggu I Agustus 2023	Bagian Hukum Setda

Demikian disampaikan untuk ditindaklanjuti dan dijadikan panduan dalam penyusunan rancangan awal Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 serta Matrik rancangan awal Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 sebagai bahan masukan penyusunan rancangan awal RKPD Kabupaten Sumenep Tahun 2024.

Sumenep, Juli 2023
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL,
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
SELAKU KETUA KELOMPOK KERJA IV
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL,
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN
TENAGA KERJA
KABUPATEN SUMENEP



Dr. R. ABD. RAHMAN RIADI, SE, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 197101251995031001